



# K R I T I S

JURNAL UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA

Gambar Sampul: Agus S

KRITIS		I S I	
<b>Pelindung:</b> Willi Toisuta Rektor			Editorial
<b>Penanggungjawab:</b> John J.O.I. Ihalauf Pembantu Rektor Urusan Akademik	4	Kekuasaan, Kebahasaan, dan Perubahan Sosial. <b>Oleh: Ariel Heryanto</b>	
<b>Ketua Dewan Redaksi:</b> Hendrawan Supratikno	54	Bahasa dan Perubahan Sosial di Kota-kota Indonesia. <b>Oleh: Dede Oetomo</b>	
<b>Anggota:</b> Arief Budiman Ariel Heryanto Aris Tanone John J.O.I. Ihalauf Loehoer Widjajanto Nathanael Daldjoeni	65	Pentingnya Serendipitas di dalam Penelitian. <b>Oleh: Gunawan Wiradi</b>	
<b>Sekretariat dan Usaha:</b> Sumbada Kepala Biro Humas	74	Penurunan Rumus Kesetaraan Massa dengan Tenaga dari Kekasaran "Panjang" Vektor-4 Pusa - Tenaga melalui Asas Kebersesuaian. <b>Oleh: Liek Wilardjo</b>	
<b>Alamat Redaksi:</b> Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro 54 - 58 Telp. 81362-81363-81364 Salatiga	84	<b>Timbangan Buku</b> Pelajaran dari Dunia Bisnis. <b>Oleh: Hari Sunarto</b>	
	90	<b>Komentar Pembaca</b>	
	92	<b>Abstract</b>	
	95	<b>Penulis Nomor Ini</b>	

# KEKUASAAN, KEBAHASAAN, dan PERUBAHAN SOSIAL \*)

Oleh: Ariel Heryanto



*Benarkah masyarakat membutuhkan pembinaan dan pengembangan bahasa? Benarkah ada yang tidak baik atau tidak benar pada bahasa masyarakat yang tidak dibina? Semua itu dijawab "tidak" oleh Ariel Heryanto. Menurutnya lagi, bahasa tidak pernah netral, secara politik ataupun ekonomi. Berpihak kepada siapakah bahasa yang kita akrabi selama ini? Bagaimana keberpihakan itu dapat dijelaskan?*

Karangan ini dimaksudkan terutama untuk menunjukkan perlunya pengkajian kembali secara mendasar sejumlah pemikiran tentang bahasa yang kini dominan di Indonesia. Walaupun kajian demikian sudah pernah ada, tapi yang

ada itu masih sangat minim dan langka.

Kita telah sering mendengar tuduhan bertubi-tubi dari berbagai pihak tentang tidak/kurang baik dan benarnya bahasa sebagian besar orang Indonesia. Tuduhan-tu-

\*) Naskah tulisan ini diselesaikan penulisnya pada tahun 1985, walau baru pada tahun 1987 ini diterbitkan. Di antara tenggang waktu itu penulis mendapatkan data-data baru yang dapat melengkapi kajian di sini, disamping beberapa komentar dari Prof. Alton L. Becker, Dr. Keith Foulcher, Dr. Dede Oetomo, dan Drs. Bintoro M.A. Kepada mereka, khususnya kepada Prof.

Alton L. Becker yang telah mengenalkan dasar-dasar pijakan teoritis untuk kajian ini, penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Tulisan yang diterbitkan ini tidak mengalami perubahan besar, hanya perubahan susunan sejumlah kalimat dan tanda-baca, dari naskah aslinya. Penulis berharap dapat memanfaatkan masukan-masukan baru tersebut di atas dalam kerja penulisan karya lain yang akan datang.

duhan semacam itu pada umumnya tidak disertai atau diimbangi dengan kajian teoritis secara kokoh dan mendasar tentang hakekat dan fungsi bahasa. Akibatnya, sebagian besar kaum terpelajar kita hanya menerima tuduhan itu dan beramai-ramai menyambut tuduhan itu dengan usaha besar-besaran untuk memperbaiki dan membenarkan bahasa kebanyakan orang Indonesia.1)

Menurut kesimpulan sementara saya, persoalan utama kita sekarang bukanlah bagaimana menemukan/melaksanakan usaha pengembangan dan pembinaan bahasa yang baik dan benar, tetapi lebih mendasar dari itu: bagaimana memahami sudah baik/benar atau

belumnya dasar pemikiran yang melahirkan anggapan adanya masalah bahasa yang tidak/kurang baik dan benar itu. Persoalannya bukan mencari, menemukan, dan memakai obat yang mujarab untuk suatu penyakit yang dianggap ada, tetapi memahami dulu ada-tidaknya penyakit itu, dan kalau ada,

apa sesungguhnya penyakit itu.2)

Untuk mendekati (dan moga-moga bisa mencapai) tujuan penulisan karangan ini, pertama-tama akan disajikan suatu tinjauan teoritis tentang dua kelompok pandangan mendasar tentang bahasa dan perbandingan penyebarannya di Indonesia. Baru setelah itu, belahan berikut dari tulisan ini akan dipusatkan pada kajian tentang masalah atau isu kebahasaan yang paling dominan di Indonesia masa ini, di bawah panji-panji isu "bahasa Indonesia yang baik dan benar". Moga-moga dengan menggali pokok permasalahan kebahasaan kita itu ke akar-akarnya, akan kita peroleh pemahaman yang lebih fundamental tentang sejumlah gejala kebahasaan yang muncul ke permukaan. Moga-moga, dengan demikian kita tidak hanya mengumbar keluhan, tuduhan, keprihatinan atau penyesalan tentang rendahnya kemampuan berbahasa warga masyarakat kita, atau mengobrol tenaga, waktu dan dana untuk meningkatkan kemampuan mereka. Moga-moga kita dapat merumuskan permasalahan yang lebih tepat, sebelum mengusahakan jawaban yang tepat.

1) Keadaan demikian dapat dibandingkan dengan bidang-bidang kehidupan sosial lain di Indonesia. Arief Budiman, dan beberapa ahli ilmu sosial lain, telah berkali-kali menulis tentang kurangnya kajian teoritis yang mendalam mengenai usaha pembangunan di Indonesia lewat modernisasi dan industrialisasi (Budiman, 1979, 1982, 1983). Dalam bidang kesusasteraan, banyak orang berusaha meningkatkan daya apresiasi masyarakat luas, tanpa banyak mengkaji secara mendasar hakekat dan fungsi "kesusasteraan" (Ariel, 1984). Begitu pula halnya dalam bidang pendidikan (Winarno, 1985).

2) Dengan jitu Arief Budiman (1983:81) menyatakan bahwa "Dalam ilmu yang penting bukan jawaban setiap pertanyaannya". Jawaban dalam ilmu, menurut saya juga penting, walau secara relatif bisa dikatakan tidak sepenting pertanyaan. Rumusan pertanyaan membatasi kemungkinan penemuan jawaban. Pertanyaan yang tepat akan menghantar kita pada jawaban yang tepat. "The real power of hermeneutical consciousness", menurut Gadamer (1976:13), "is our ability to see what is questionable".

## DUA KELOMPOK BESAR PANDANGAN.

Secara kasaran, dapat dianggap ada dua kelompok besar pandangan yang mendasar tentang hakekat dan fungsi bahasa. Tentu saja, pengelompokan ini, sedikit atau banyak, merupakan kategori yang disederhanakan atas kenyataan yang ada. Pengelompokan demikian dibuat sebagai suatu gagasan abstrak yang dikonstruksikan untuk memudahkan pembicaraan dan pemahaman, walau mungkin tidak ada contoh konkrit untuk mewakili secara murni masing-masing kelompok. Dengan demikian pengelompokan kasaran tersebut tidak untuk dipahami secara mutlak sebagai gambaran dari kenyataan. Bagaimana pun, dengan segala cacat yang ada, pengelompokan demikian tetap menyajikan jasa dan manfaat yang amat besar. Pengelompokan yang akan diuraikan di bawah ini bersumber dari tulisan Alton L. Becker (1984).<sup>3)</sup>

Dalam kelompok pandangan yang pertama, bahasa dipahami sebagai suatu sistem kaidah-kaidah. Susunan kaidah-kaidah itu dianggap mempunyai ciri yang penting, yakni "logis". Kegiatan berbahasa dianggap sekedar atau terutama sebagai contoh - contoh perwujudan praktis/material dari

3) Dalam tulisannya, sebenarnya Becker tidak secara langsung membahas dua kelompok besar pandangan atas "bahasa", melainkan "tata-bahasa". Tapi menurut penafsiran saya (dan dinyatakan secara implisit oleh Becker sendiri) dua kelompok besar pandangan atas "tata-bahasa" tersebut dapat diperluas menjadi dua kelompok besar pandangan atas "bahasa".

kaidah-kaidah tersebut, yang bisa setia ("baik" dan/atau "benar") atau tidak pada kaidah-kaidah tersebut. Dalam studi kebahasaan pada kelompok besar pandangan pertama ini, terlihat kecenderungan untuk mengandalkan dan mengunggulkan sifat/sikap "obyektif". Bahasa dipandang sebagai suatu sistem yang statis, tertutup dan kadang-kadang dianggap mempunyai hakekat/fungsi yang "universal".

Dalam kelompok pandangan yang kedua, bahasa dipahami sebagai sesuatu yang secara mendasar atau mutlak terkait pada konteks sosial-historis tertentu.<sup>4)</sup> Kaidah-kaidah bahasa bukannya tidak diakui ada, tetapi kaidah-kaidah tersebut dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa dalam proses perubahan sehubungan dengan dinamika gejala perubahan sosial-budaya tertentu. Karena itu, dalam kegiatan studi kebahasaan pada kelompok kedua ini apa yang biasa disebut "pembakuan" bahasa (secara "obyektif" dan/atau "logis") tidak menjadi sasaran yang penting. Dengan kata lain, bahasa tidak dianggap sebagai suatu sistem yang tertutup atau pun statis. Ke-

4) Istilah-istilah "universal" dan "kontekstual" (maupun "konteks sosial-historis") menjadi bagian dari istilah kunci terpenting dalam sejumlah besar perdebatan kesusasteraan Indonesia sejak tahun 1984. Kebetulan saya terlibat dalam perdebatan tersebut. Modal keterlibatan saya dalam perdebatan itu berasal dari pengalaman belajar pada bidang studi yang lebih condong pada kategori formal "bahasa" daripada "sastra". Tapi kini pada forum "sastra" lah persoalan "universal" versus "kontekstual" itu mendapat peluang lebih besar untuk tampil ke permukaan di Indonesia.

giatan berbahasa yang hidup tidak dianggap kalah penting daripada kaidah-kaidah bahasa, karena kegiatan berbahasa tidak dianggap sekedar perwujudan dari kaidah-kaidah yang sudah ada. Kegiatan berbahasa yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ada tidak dengan sendirinya dinilai sebagai contoh berbahasa yang tidak baik atau tidak benar. Hubungan antara kaidah bahasa dan kegiatan berbahasa dihargai sebagai hubungan yang bersifat timbal-balik, saling membentuk dan saling mengisi. Kedua-duanya dianggap sama penting. Kalau "obyektivitas" tidak dipentingkan dalam studi kebahasaan pada kelompok kedua ini, juga bukan "subyektivitas" yang ditonjol-tonjolkan, tetapi konteks sosial historis.<sup>5)</sup>

Untuk mudahnya, kelompok besar pandangan yang pertama dalam sisa tulisan ini akan disebut Universalis. Sedang kelompok besar pandangan yang kedua akan disebut Kontekstualis. Sebagai nama, Universalis dan Kontekstualis akan ditulis dengan huruf-besar pada awal nama itu.

Dalam tulisannya yang telah disebut di atas, Becker (1984) memberikan sejumlah contoh konkrit pendapat-pendapat ahli bahasa yang sedikit atau banyak dapat mewakili salah satu dari kedua kelompok besar pandangan di atas.

5) Pemikiran Stanley Fish (1980:332) sangat membantu saya memahami dan merumuskan persoalan tersebut. Menurut Fish, sungguh keliru jika ada yang mempertentangkan "obyektivitas" dan "subyektivitas", sebab keduanya tidak pernah ada secara murni.

Raymond Williams (1977:21-44) tidak saja memberikan contoh-contoh serupa itu, tapi juga menjelaskan penafsiran tentang kaitan sosial-historis di antara sejumlah pendapat penting tentang bahasa, khususnya dalam sejarah perubahan masyarakat Eropah.

Uraian seperti yang diberikan Williams itu sangat menarik dan pantas untuk diringkas dalam tulisan ini. Tetapi saya ingin menundanya dulu hingga ke bagian lain dari tulisan ini. Kita amati dulu situasi yang hidup dan dominan di tanah air sendiri pada masa ini. Sesuai dengan sasaran terdapat publik penerbitan tulisan Becker dan Williams, sebagian besar contoh-contoh yang mereka kemukakan berasal dari masyarakat yang lasim disebut "Barat".

## DI INDONESIA KINI

Sejauh pengamatan saya belum ada suatu studi yang mendalam dan komprehensif tentang sejarah pandangan-pandangan "pribumi" masyarakat di kepulauan Nusantara tentang bahasa. Yang kini nampak sangat menonjol ialah dominasi pandangan atas bahasa yang tidak saja "asing" (atau "Barat"), tetapi lebih khusus lagi pandangan "asing" yang termasuk dalam kelompok pandangan Universalis dalam uraian di atas.

Yang paling banyak kita miliki saat ini ialah studi dan publikasi tentang bahasa (khususnya ke arah pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar), tanpa diimbangi kajian yang kritis dan mendasar tentang bahasa. Dalam jumlah lebih kecil dan bobot yang lebih be-

sar, kita memiliki sejumlah studi dan publikasi tentang beberapa aspek terpilih dari bahasa Indonesia dan/atau bahasa-bahasa daerah. Tetapi sebagian besar dari studi dan publikasi demikian bertolak dari pandangan mendasar yang hanya diambil-alih dari pandangan yang pernah dominan di "Barat", tanpa cukup memperhitungkan konteks sosial-historis bahasa yang dijadikan obyek bahasan. Sudah ada, walau belum banyak, karya-karya ilmiah yang menyinggung beberapa keping bagian dari pandangan masyarakat "pribumi" kita tentang bahasa.<sup>6)</sup> Tetapi karya-karya ilmiah demikian tidak secara khusus mengkaji sejarah pertumbuhan pandangan mendasar tentang bahasa secara mendalam dan komprehensif, dan/atau memang tidak dimaksudkan demikian oleh penulisnya.

Mungkin kita memang tidak dapat mengharap bisa menemukan seperangkat rumusan teoritis yang dapat dianggap sebagai pernyataan otentik, komprehensif, dan mendasar tentang "bahasa" di kalangan masyarakat "pribumi". Maksud saya, bukannya teori milik masyarakat "pribumi" itu telah terhilang atau musnah ditelan jaman. Tetapi hal itu memang tidak pernah ada, dan tidak mereka usahakan supaya ada. Sebab "kenyataan" yang (dengan "bahasa") kita sebut sebagai "bahasa" merupakan suatu pengertian kategoris yang tidak universal. Tegasnya

6) Untuk sekedar memberikan contoh, dapat disebutkan, misalnya saja, tulisan-tulisan Benedict R. Anderson (1966, 1982) dan Alton L. Becker (1974, 1979, 1982).

tidak semua masyarakat dari segala jaman memiliki pengertian kategoris "bahasa".<sup>7)</sup> Kita dapat-dapat saja menganggap bahwa semua kelompok hidup manusia bersama memiliki "bahasa", walau dengan jenis yang bermacam-macam. Tapi itu tetap merupakan suatu anggapan/pandangan yang ada dalam suatu konteks sosial-historis tertentu. Bukan suatu gambaran "obyektif" tentang realita apa adanya. Itu tetap anggapan/pandangan kita, yang tidak dengan sendirinya juga dimiliki oleh segala masyarakat dari segala jaman. Sedikit atau banyak kita me-universal-kan "bahasa" sebagai suatu pengertian kategoris. Apa yang saya maksudkan atau harapkan dengan studi tentang sejarah pandangan "pribumi" tentang "bahasa" hendaknya dipahami dalam kerangka pemikiran demikian.

Kita dapat-dapat saja (dengan sejumlah cacat yang tak terhindarkan) mencoba memahami kenyataan "pribumi" masa lalu dengan menggunakan kerangka pengertian kategoris "modern" (biar pun dari "Barat") demi kepentingan kita masa ini asal kita sadar akan batas-batas hasil atau manfaat studi

7) Dengan demikian, saya tidak sejalan-pikir dengan Professor S. Wojowasito (1965:7-8) yang merasa bisa menguraikan dan membandingkan sejumlah pengertian "bahasa" dalam berbagai bahasa di berbagai tempat dan jaman (Indonesia, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Arab, dan Sansekerta). Tetapi saya dapat menerima perbandingan semacam itu dalam tingkat/jenis pengertian lain (seperti yang akan saya jelaskan di sini), dan asal batas-batas pengertian demikian dijelaskan secara eksplisit.

demikian.<sup>8)</sup> Studi semacam itulah yang saya katakan langka sekali, atau mungkin memang belum pernah ada, dalam bidang pemahaman sejarah pandangan "pribumi" tentang "bahasa".

Nampaknya ada kaitan, baik langsung maupun tidak, di antara dua gejala terurai terdahulu: adanya dominasi pandangan Universalis tentang bahasa di satu pihak, dan langkanya minat/perhatian (apalagi hasil) studi dan publikasi tentang pandangan "pribumi" yang mendasar tentang "bahasa". Menjelaskan kaitan yang langsung itu tidaklah sesulit menjelaskan kaitan-kaitan yang kurang langsung. Seperti telah disebutkan di atas, salah satu ciri menonjol dari pandangan Universalis atas bahasa ialah keyakinannya pada sifat "universal" hakekat/kaidah/fungsi bahasa. Sehingga, tidaklah mengherankan jika mayoritas pen-

8) Orang "Barat" dapat-dapat saja, jika memang berhasrat, mempelajari *tenses* dalam bahasa Indonesia misalnya, walau kita semua tahu betapa kecilnya manfaat studi demikian, karena *tenses* tidak universal, dan tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Tapi kita boleh mengharapkan manfaat yang cukup besar dari usaha-usaha seperti mempelajari pandangan "pribumi" Asia Tenggara tentang "masa lampau", "historiografi" atau "sejarah" yang pernah dihimpun oleh Anthony Reid dan David Marr (1979). Atau usaha mempelajari "konsep" Jawa tentang "power" seperti yang pernah ditulis Benedict R. Anderson (1972), walau masyarakat Jawa mungkin tidak memiliki pengertian "pribumi" baik tentang "konsep" maupun "power" seperti dalam pengertian bahasa yang dipakai Anderson. Sebagai cendekiawan yang berpandangan luas, Anderson memahami hal itu dan memberikan catatan-kaki (nomor 7) yang panjang-lebar tentangnya. Lihat juga tulisan Goenawan Mohamad (1985).

dukung pandangan seperti itu tidak merasa perlu memahami (secukupnya) konteks sosial-historis kehidupan bahasa dalam masyarakat "pribumi", ketika mereka mempelajari seluk-beluk bahasa Indonesia atau daerah di Indonesia dengan teori-teori asing. Dengan demikian, kaitan langsung dari dua gejala pemahaman dan studi tentang kebahasaan itu dapat dimaklumi.

Kaitan yang tidak langsung dari kedua gejala tersebut di atas dapat dipahami sebagai gejala "penjajahan" secara ideologis. Suatu pemahaman atau ilmu pengetahuan, seperti yang sering diucapkan Romo Y.B. Mangunwijaya dalam ceramah-ceramahnya, merupakan suatu kekuatan atau kekuasaan. Romo Y.B. Mangunwijaya biasanya menekankan pengertian kekuatan atau kekuasaan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan pemilik pengetahuan. Dalam uraian ini kita perlu memahaminya dari sisi yang lain juga. Pengetahuan juga dapat menjadi kekuasaan yang justru merongrong kepentingan dan kesejahteraan si pemilik pengetahuan itu. Dominasi pandangan Universalis mengenai bahasa juga harus dipahami sebagai dominasi atas pandangan hidup dan praktek kehidupan secara material. Williams (1977:21) membuka uraiannya tentang "bahasa" dengan kalimat tajam "A definition of language is always, implicitly or explicitly, a definition of human beings in the world". Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa me-universal-kan suatu pandangan atas bahasa dari "Barat" merupakan



tindakan mem"Barat"kan dunia (atau *universe*), dan mengingkari kenyataan-kenyataan yang tidak cocok dengan pandangan itu sebagai sesuatu yang "salah" atau bahkan seakan-akan tidak "ada".<sup>9)</sup> Dengan rumusannya sendiri Becker (1984:145) menjelaskan hal tersebut lewat kata-kata: "*One of the most subtle forces of colonialism, ancient or modern, is the undermining of not just the substance but the framework of someone's learning*". Dan karena kekuatan/kekuasaan penjajahan tersebut sangat "halus" (*subtle*, dalam kutipan pernyataan Becker di atas), usaha untuk melawannya tidak akan pernah mudah.

Itulah sebabnya, walau beberapa kenyataan kebahasaan dalam masyarakat kita mungkin telah sering ditemui para pengamat ilmu bahasa sebagai hal-hal yang tidak cocok dengan teori-teori yang mereka pelajari dari negeri asing, penemuan tersebut tidak cukup me-

9) Tulisan George Quinn (1983) memberikan ilustrasi yang sangat bagus. Ia menunjukkan dua hal. Di satu pihak, terdapat kecenderungan di kalangan para pengamat bahasa dan sastra Jawa seakan-akan bahasa dan sastra Jawa sudah sekarat atau bahkan mati. Di pihak lain, ia menunjukkan betapa hebatnya perkembangan bahasa dan sastra Jawa (minimal secara kuantitatif) pada masa ini yang tidak tertandingi oleh jaman-jaman sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Quinn sebagai akibat merajalelanya suatu kekuatan ideologis dalam kehidupan sosial kita pada umumnya, dan dalam kegiatan ilmiah pada khususnya. Tulisannya: "*Vitality in contemporary Javanese writing does not fit into 'reality' as it is constructed in the ideologies of this state; therefore it is simply not seen, or, if it is seen, it is perceived as a threat.*" (Quinn, 1983:35).

rangsang usaha pengkajian kembali teori-teori mendasar yang sedang mereka pakai dan sedang mapan dalam pranata sosial kita selama ini. Tidak jarang penemuan demikian hanya dipahami sebagai "perkecualian" yang aneh, "kelainan", disingkirkan dan dianggap tidak ada, atau dicocok-cocokkan supaya pas dengan kerangka pandangan dan rumusan teoritis yang sedang mapan. Empat contoh berikut barangkali dapat memperjelas apa yang saya maksudkan. Keempat contoh ini bukan penemuan baru, dan bukannya tidak pernah dipermasalahkan orang. Tapi keempatnya tetap aktual untuk disajikan kembali di sini, karena nampaknya belum banyak dipersoalkan secara mendasar.

#### CONTOH-CONTOH

Contoh pertama dapat diangkat dari masalah lama yang menyangkut penggolongan kategoris atas kata-kata menurut "jenis-kata"-nya. Penggolongan yang konon dianggap dirumuskan pertama kalinya oleh Aristoteles (384-322SM)<sup>10)</sup>

10) Salah satu tokoh perintis ilmu bahasa di Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana (1959:65) mencatat "Dalam membedakan kata-kata bahasa Indonesia sekarang umumnya orang mengikuti pembagian Aristoteles, yaitu sepuluh jenis kata". Pernyataan ini disanggah oleh Wojowasito (1965:36-37) yang menunjukkan bahwa Aristoteles merumuskan tiga "jenis-kata", yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai pihak dari berbagai jaman dalam jumlah dan dengan nama "jenis-kata" yang berbeda-beda. Kritik serupa dilontarkan oleh Harimurti (1982:87-88): "Selalu dinyatakan orang, bahwa Aristoteleslah yang membuat pembagian jenis-kata sebanyak 10 jenis. Secara historis ini tidak

itu rupanya masih tetap banyak dipakai oleh sebagian kaum terpelajar kita sebagai sesuatu yang seakan-akan bersifat universal.

Sutan Takdir Alisjahbana (1959:65-66) mau pun S. Wojowasito (1965:36-37) sudah cukup lama memperingatkan ke-tidak-universal-an pembagian jenis-jenis kata demikian itu. Pembagian jenis-kata itu tidak dapat diterapkan secara memuaskan, menurut mereka berdua, baik untuk bahasa-bahasa di Eropah sendiri, apalagi untuk bahasa Indonesia yang mempunyai jarak kesejarahan lebih besar daripada sesama bahasa-bahasa di Eropah. Tapi kedua penulis Indonesia itu juga mengakui merajalelanya penerapan pembagian jenis kata yang berasal dari konteks sosial-historis "asing" bagi bahasa Indonesia tersebut. Bahkan hingga dekade ini kemapanan merajalelanya penerapan pembagian jenis-kata itu rupanya masih tak banyak tergoyahkan, seperti yang dikeluhkan Harimurti (1982:87) sebagai praktek pandangan "kuno" yang dianggap bersifat "universal" oleh khalayak terpelajar, sehingga terjadi "pemaksaan" pada studi kenyataan kebahasaan di Indonesia yang tidak cocok dengan rumusan teoritis tersebut.<sup>11)</sup> Bahkan dalam

tepat. Aristoteles membagi kata-kata Yunani Kuno menjadi 3 jenis....". Tapi menurut Peter H. Salus (1969:3) Platonlah yang diakui banyak orang sebagai orang pertama yang membedakan "kata benda" dan "kata kerja".

11) Tetapi kurangnya tepat atau adil, jika Harimurti (1982:86) menilai orang seperti S. Takdir Alisjahbana tidak memahami "kekeliruan" me-universal-kan kate-

salah satu buku "ilmiah" terbaru tentang ilmu bahasa di Indonesia, pandangan Universalis mengenai hal itu masih dikukuhkan. Gorys Keraf (1984 : 33) menyatakan: "Tiap bahasa di dunia memiliki ciri-ciri kesemestaan (*universal*) tertentu", dan salah satu ciri yang disebutkannya: "Tiap bahasa di dunia memiliki kelas-kelas kata tertentu, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti orang, dan kata bilangan".

Bagaimana para ahli bahasa kita menghadapi problema tersebut, merupakan suatu pokok bahasan tersendiri yang menarik. Berikut ini akan saya petik beberapa contoh dari sumber acuan yang telah saya kemukakan di atas. Harimurti (1982:88) menilai pembagian kata dalam Bahasa Indonesia seperti yang lazim telah kita kenal itu sebagai "bukannya menunjukkan kemajuan dalam penyelidikan bahasa, melainkan kemunduran lebih dari 2000 tahun!". Ia menegaskan "tugas seorang ahli tata bahasa untuk menemukan pola-pola yang ada dalam bahasa Indonesia dan menemukan istilah, klasifikasi dan kategori yang tepat bagi Bahasa Indonesia". Tapi dalam buku yang sama ia belum menunjukkan usaha yang diresepkan sendiri itu. Wojowasito (1965) mengemukakan problema atau kekeliruan serupa tanpa banyak mengemukakan pandangan alternatifnya. Yus Badudu (1982:115) mengamati persoalan "jenis-kata" itu

gori jenis-kata itu sejak Alisjahbana menulis buku *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia* di tahun 1950an, sebagaimana telah saya bahas di atas.

secara kurang mendasar, dan menilai persoalan itu hanya sebagai persoalan "bersimpang-siurnya peristilahan" untuk setiap jenis kata.<sup>12)</sup> Yus Badudu dan S. Takdir Alisjahbana menyinggung - nyingung "logika" dalam menanggapi persoalan tersebut. Menurut Yus Badudu (1982:118) kesulitan menggolong-golongkan kata menurut jenisnya dengan cara yang dipakai St. Muh Zain ialah karena "dalam bahasa sering kita jumpai gejala-gejala tak logis". Seakan-akan "logika" yang datang dari suatu bagian sejarah sosial "Barat" itu bersifat universal. Kenyataan "pribumi" yang tidak cocok denganya dianggap sebagai suatu kelainan, penyimpangan, atau kekeliruan (walau kelainan, penyimpangan, atau kekeliruan itu telah diakui keberadaannya dan dianggap sah). Nampaknya masyarakat "pribumi" tidak diharapkan memiliki *sejenis* "logika" tersendiri. S. Takdir Alisjahbana (1959:66) menilai apa yang tidak "logis" itu sebagai ciri dari pikiran rakyat jelata yang "logikanya tidak seluruh dan setajam logika ahli ilmu" (ala "Barat").

Langkanya, atau bahkan mungkin belum adanya usaha studi tentang bahasa yang dengan berani

12) Menurut pengakuannya sendiri ia "sengaja" tidak membicarakan "pembagian kata bahasa Indonesia menurut jenisnya, karena buku ini tidak dimaksudkan untuk mengupas persoalan yang masih dipertikalkan itu". Alasannya, buku itu merupakan "pendahuluan pembicaraan". Persoalannya, justru pada tahap "pendahuluan" itulah seorang terpelajar semestinya memahami persoalan-persoalan yang sangat mendasar karena hal itu menentukan cara dan prestasi kerja lanjutannya.

mengkaji secara kritis dan mendasar atau radikal pokok-pokok pikiran teoritis yang kini sedang mapan menghasilkan gejala-gejala "tambal-sulam" atau pengukuhan apa yang telah mapan itu. Masih segar dalam ingatan saya bagaimana seorang dosen di Indonesia menjelaskan "sulit"nya (bukan "mustahil" atau "sia-sia"nya) menentukan jenis-kata untuk kata "tidur" atau "mati" dalam kalimat yang sederhana seperti "Dia tidur" atau "Dia mati": kata kerja atautkah kata keadaan?<sup>13)</sup> Karena kategori jenis kata dianggap pasti atau harus ada pada setiap bahasa (universal), maka bukannya dasar-dasar anggapan itu yang digugat sang dosen. Ia berusaha menemukan alasan dan penjelasan yang dianggap paling baik dan benar agar bisa mencocok-cocokkan kenyataan dalam bahasa Indonesia itu pada rumusan teoritis yang sudah mapan dan dianggap tidak bisa keliru. Ia mencari suatu jawaban yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya untuk pertanyaan yang tidak dikaji secara kritis dan mendasar. Yus Badudu (1982:116-119) merekam sejumlah perdebatan tentang pokok yang sama dan mengajukan pendapatnya sendiri.

Semua pendapat-pendapat itu, termasuk pendapat Yus Badudu sendiri, masih tidak beranjak dari pilihan kemungkinan jawaban yang telah mapan: "kata kerja" dan/

13) Pertanyaan "sulit" semacam itu barangkali tidak ada dalam analisa bahasa Inggris yang mempunyai kalimat *He/She is/was asleep* (predikatnya kata keadaan) dan *He/She sleeps/slept* (predikatnya kata kerja), atau *He/She is/was dead* dan *He/She dies/died*.

atau "kata keadaan". Perdebatan perdebatan tentang hal itu masih pada tingkat "substance", belum pada "framework" seperti yang disebutkan Becker dalam kutipan di atas.

Contoh kedua sehubungan dengan pemilahan kategoris "kalimat aktif" dan "kalimat pasif". Persoalan ini tidak baru, tetapi nampaknya belum cukup digarap secara mendasar pula. Kita telah sering mendengar pendapat bahwa dalam bahasa Indonesia banyak digunakan kalimat pasif, sedangkan dalam bahasa Inggris banyak digunakan kalimat aktif. Seakan-akan pemilahan kategoris aktif/pasif demikian berlaku universal.

Dari perbandingan kedua bahasa tersebut, bukannya timbul suatu perdebatan yang meriah tentang sejauh mana perbandingan (dalam "framework") demikian dapat dibenarkan. Yang muncul ialah sejumlah usaha dan perdebatan tentang ("substance") mana yang disebut "kalimat pasif/aktif" dan/atau mengapa terjadi perbedaan di antara kedua bahasa demikian.

S. Takdir Alisjahbana (1959:33-34) dan Yus Badudu (1980:104-110) menguraikan pendapat masing-masing mengenai bagaimana membentuk "kalimat pasif" dalam bahasa Indonesia secara baik/benar. Alisjahbana (1959:31-32) juga menjelaskan penafsirannya mengapa orang Indonesia suka memakai "kalimat pasif":

"Agaknya hal ini berhubungan dengan keadaan masyarakat Indonesia lama yang tidak mengemukakan orang tetapi perbuatan. Dalam bahasa Indonesia sekarang

orang lebih banyak memakai kalimat aktif oleh pengaruh bahasa2 Barat dan perubahan yang berlaku pada pribadi Bangsa Indonesia. Tetapi dalam surat2 jabatan yang tiada mengemukakan orang yang menulisnya, masih terkemuka bentuk katakerdja yang pasif."<sup>14)</sup>

Tentang kategori pasif/aktif itu, seperti juga tentang kategori jenis kata, Harimurti (1982:86) hanya memberikan tanggapan selintas. Menurutnnya, hal itu hanyalah penerapan (membabi-buta) model yang ada di dalam Bahasa Belanda kepada Bahasa Indonesia. Walaupun tanggapannya pendek, Harimurti memberikan ilustrasi yang menarik: "Kalimat 'anjing kupukul' dikatakan kalimat pasif karena terjemahannya dalam Bahasa Belanda.... adalah kalimat dengan kata kerja pasif". Ilustrasi itu menarik, karena banyak di antara kaum terpelajar mutakhir kita yang mungkin masih tetap memahami kalimat "Anjing kupukul" itu sebagai "kalimat pasif" walau mereka tak mengenal (terjemahannya dalam)

Bahasa Belanda. Terpelajar mutakhir kita lebih akrab pada bahasa Inggris daripada Belanda. Terjemahan yang *lasim* untuk kalimat seperti itu dalam Bahasa Inggris justru berbentuk (ber-voice) "kalimat aktif". Apakah dengan demi-

14) Menurut Drs. Bintoro MA, penafsiran dan perdebatan penafsiran semacam ini sudah kurang diminati para ahli mutakhir. Tetapi sekitar sepuluh tahun yang lalu, saya dan sejumlah mahasiswa sekuliah pernah diminta membaca tulisan Gloria Soepomo tentang seluk-beluk terjemahan. Dalam tulisan itu, penulisnya juga mencoba memberikan penjelasan mengapa terdapat banyak "kalimat pasif" dalam bahasa Indonesia. Sayang, tulisan yang menarik itu tidak berhasil saya temukan kembali.

kian kaum terpelajar kita dikuasai oleh rasionalisasi versi lain yang menuju pada hasil serupa karena *the dog is/was beaten by me* merupakan kalimat yang jelek/salah, maka kalimat pasif "Anjing dipukul oleh saya" dianggap sebagai kalimat pasif yang jelek/salah? Walau sudah menemukan contoh-contoh konkrit penggunaan kata kerja dengan awalan di- untuk membentuk "kalimat pasif" dengan obyek pelaku orang pertama, S. Takdir Alisjahbana (1959:33) menilai bentuk pemakaian seperti itu "tak boleh dipakai". Dari ilustrasi tersebut nampaklah sikap normatif menilai kaidah berbahasa di atas gejala umum kegiatan berbahasa; kegiatan berbahasa yang nyata diharuskan tunduk pada kaidah berbahasa, sekalipun kaidah itu bersumber dari masyarakat dan sejarah asing.<sup>15)</sup>

Becker (1984:142) bisa menerima manfaat menjelaskan suatu ungkapan bahasa Burma sebagai

15) Ada contoh serupa yang berasal dari masa mutakhir. Yus Badudu (1980:108-110) menilai kalimat "pasif" yang kata kerjanya disertai/didahului kata-kata seperti "suka, ingin, mau, senang, berhasil" (misalnya contoh yang dikemukakananya "Pencopet itu berhasil dibekuk oleh polisi") sebagai kalimat yang "rancu", "kacau", dan "tidak logis". Penilaian demikian dilontarkan, walau ia sadar kalimat-kalimat semacam itu telah menjadi bagian berbahasa yang lasim dalam masyarakat kita, dan walau pada kesempatan lain ia mengakui keabsahan sesuatu yang "tak logis" dalam berbahasa (Badudu, 1982:118). Perdebatan tentang yang logis dan tak logis dalam bahasa sudah berusia tua di Eropah, setidaknya sudah ada sejak 400 tahun SM dan berlangsung 1000 tahun berikutnya (Salus, 1969:3).

ungkapan pasif, walau ia mengingatkan bahaya yang besar jika orang menganggap kategori "pasif" itu merupakan "kenyataan" yang "universal".

Ketidak-universalan kategori kalimat pasif/aktif itu tampak semakin gamblang jika hendak diterapkan untuk menjelaskan kalimat-kalimat dalam Bahasa Tagalog. Apa yang disebut *voice* (pasif/aktif) dalam bahasa Inggris akan sangat tidak memuaskan jika dipakai untuk menjelaskan kalimat-kalimat dalam Bahasa Tagalog. Teresita V. Ramos dan Videia de Guzman (1971) menggunakan istilah *focus* untuk menjelaskan lima (bukan dua, seperti *voice* dalam bahasa Inggris) macam kalimat Bahasa Tagalog, yang bercirikan lima ragam kata kerja, sesuai dengan lima ragam *focus*: *actor*, *goal*, *locative*, *benefactive*, dan *instrumental*. Jika *voice* dalam Bahasa Inggris hendak dijelaskan dengan kerangka *focus* ala Bahasa Tagalog, maka dapat dikatakan Bahasa Inggris hanya mempunyai dua ragam *focus*, yakni *actor* (*active-voice*) dan *goal* (*passive-voice*). Seandainya sejarah dunia penjajahan masa lalu terbalik, dan seandainya masyarakat Tagalog menjadi salah satu bangsa penjajah terkuat di dunia, barangkali *focus* ala Tagalog dianggap banyak bangsa-bangsa bekas terjajah sebagai kategori yang universal. Siapa tahu?

Contoh ketiga saya angkat dari persoalan yang berhubungan dengan apa yang disebut *gender* dalam Bahasa Inggris. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dalam suatu ceramah di Salatiga, Romo

Dick Hartoko, dengan penuh keyakinan menegaskan suatu perbedaan orientasi nilai sosial dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat berbahasa Inggris. Menurut Romo Dick, dibandingkan dengan masyarakat berbahasa Inggris masyarakat kita lebih mementingkan tingkat usia seseorang, sedang masyarakat berbahasa Inggris lebih mementingkan jenis kelamin seseorang. Perbedaan itu, menurutnya, terungkap pada perbedaan kategori verbal untuk menyatakan jenis-jenis saudara sekandung di kedua bahasa/masyarakat itu: adik/kakak dan *brother/sister*.

Pentingnya *gender* dalam bahasa Inggris itu ditunjukkan lebih jauh lagi oleh Romo Dick pada kategori kata ganti orang ketiga tunggal: *he/his/him* dan *she/her/her* yang tidak terdapat padanannya di Indonesia: (d)ia/nya.<sup>16)</sup>

Waktu itu, ceramah Romo Dick yang secara tak langsung sudah menuding ketidak-universalan sistem bahasa cukup meyakinkan hadirin yang mendengarkannya. Tapi sekarang, entahlah, apakah Romo itu masih tetap mempertahankan pendapatnya tanpa revisi sedikit pun. Sejak mendengar ceramah Romo itu, saya menyaksikan secara langsung proses *genderisasi* dalam bahasa Indonesia, entah apa pun

16) Masyarakat berbahasa Inggris masih kurang *gender-minded* dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat berbahasa lain di Eropah; sampai-sampai benda-benda mati juga diberi *gender*. Marcus T. Varro (116SM) mengusulkan nama yang berbeda-beda untuk binatang yang berbeda jenis kelamin (Salus, 1969:6).

sebab-musababnya.<sup>17)</sup> Misalnya dengan mekarnya popularitas pasangan kata-kata seperti wartawan/wartawati, sastrawan/sastrawati, mahasiswa / mahasiswi dan sederet contoh-contoh lain. Istilah "pemuda" yang nampaknya cukup menyolok semula berarti "orang muda" (tak perduli jenis kelaminnya) kini telah dibedakan dari istilah yang baru belakangan dibentuk: "pemudi".<sup>18)</sup>

Sebelum kita membahas contoh ke empat, sebuah catatan kecil perlu disisipkan di sini. Dari contoh yang terdahulu kita dapat menga-

17) Saya yakin pendapat Anton M. Moeliono (1984:112) benar bahwa gejala ini "baru" dan timbul sebagai akibat "pengaruh bahasa Barat modern", walau pada masa lampau sudah ada bibit-bibit atau potensi untuk gejala demikian. Menurut Anton M. Moeliono: "mula-mula bahasa Melayu memungut kata Sansekerta dan Jawa Kuno seperti kata *putra* dan *putri* serta *dewa* dan *dewi*. Berabad-abad kedua pasang kata itu... dianggap.... berbeda". Kasus ini langka. Itu sebabnya, saya kira, para poeta-poetri Indonesia pada tahun 1928 menyatakan Soempah Pemoeda, bukan Soempah Pemoeda-Pemoedi.

18) Apakah gejala ini layak dikaitkan dengan pertumbuhan kesadaran "feminisme" di kalangan kaum terpelajar mutakhir kita (yang berbarengan dengan proses panjang sejarah *westernisasi* dalam berbagai bidang kehidupan sosial)? Kalau ya, bagaimana kaitan itu harus dijelaskan? Membentuk dan mempopulerkan istilah-istilah baru *bergender* perempuan tidak dengan sendirinya berarti "pembelaan" bagi kaum wartawati, sastrawati, mahasiswi atau pemudi. Hal itu juga berarti pengukuhan bergesernya makna kata-kata tertentu yang semula netral dari diskriminasi seksual kini menjadi monopoli kaum pria saja. Seorang perempuan semakin lama semakin tidak bisa menjadi wartawan, sastrawan, mahasiswa, atau pemuda. Semua ini sekarang monopoli kaum berpenis.



mati adanya hubungan timbal balik di antara pemahaman tentang bahasa dan praktek berbahasa dalam kegiatan nyata. Pemahaman tentang bahasa tidak hanya bersumber dan sepenuhnya ditentukan oleh kenyataan "obyektif" praktek kegiatan berbahasa. Pemahaman juga bisa ikut menentukan praktek kegiatan. Pemahaman yang menganggap sistem bahasa sebagai sesuatu yang "universal" tidak dengan sendirinya bersumber dari kenyataan "obyektif" adanya sistem bahasa yang "universal". Dalam contoh-contoh di atas kita menyaksikan pemahaman Universalis mendorong kegiatan me-universal-kan kenyataan berbahasa agar sesuai dengan pemahaman itu. Pembentukan dan pemakaian kamus merupakan contoh lain yang belum disebut-sebut di atas tetapi juga memberikan ilustrasi gamblang tentang pokok yang sama. Kamus pada mulanya (secara ideal) dibentuk dari kenyataan kata dan maknanya yang hidup dalam suatu konteks sosial-historis tertentu. Tetapi setelah dibukukan dan disosialisasikan justru kehidupan berbahasa yang dinamis oleh para pemilik aslinya sendiri seringkali dituntut mematuhi paktoan "kebenaran" bentuk dan makna kata ala kamus.

Hubungan dialektis tersebut tidak selalu berarti hubungan timbal balik dari dua sumber kekuatan sosial yang berimbang, tetapi seringkali berarti perebutan kekuasaan atau wewenang sosial atas pembentukan dan pemakaian makna serta nilai kebahasaan dari satu pihak oleh pihak yang lain. Hal tersebut juga tampak pada contoh

keempat berikut ini mengenai fungsi dan sistematika penamaan orang. Ada perbedaan besar dalam hal fungsi dan sistematika penamaan orang di antara masyarakat berbahasa Inggris (atau "Barat" pada umumnya) dan sebagian tidak kecil warga masyarakat kita. Perbedaan itu makin lama makin mengecil. Terjadilah proses homogenisasi berwarna "Barat". Proses itu berjalan perlahan-lahan, tetapi cukup mantap.

Dalam kebanyakan masyarakat berbahasa Inggris atau "Barat" pada umumnya dikenal pemakaian dua atau lebih kata untuk nama orang. Kata pertama (kadang-kadang yang berikutnya, tapi bukan yang terakhir) digunakan sebagai *first name* (nama depan) yang berfungsi besar dalam komunikasi informal dan akrab. Kata yang paling belakang biasa disebut *last name* (nama belakang) atau *family name* (nama keluarga) dipakai sebagai identifikasi seseorang dalam komunikasi formal. Seseorang yang nama lengkapnya "John Smith" misalnya akan sering dipanggil "John" dalam komunikasi informal/akrab dan "Mr Smith" dalam komunikasi formal.

Di Indonesia terdapat banyak (walau tidak semua) warga masyarakat yang tidak mempunyai "nama keluarga" atau "marga", termasuk mereka yang namanya terdiri lebih dari satu kata. Mereka bisa mempunyai nama (di) belakang, tetapi itu bukan *last name*, ataupun *family name*. Tidak sedikit, termasuk kedua presiden dalam sejarah Republik Indonesia sejauh ini, yang hanya memiliki satu kata untuk namanya. Di masyarakat

"Barat" nama keluarga menjadi nama kehormatan. Nama itu diambil dari "nama belakang" ayah, bukan ibu, sebab dan/atau sehingga lelaki lebih dihormati daripada perempuan. Orang yang tidak mempunyai "nama belakang", atau yang nama-belakangnya tidak jelas keabsahannya, dianggap sebagai orang yang tidak/kurang terhormat. Seakan-akan sebagai anak-jadah yang tidak jelas siapa ayahnya, walau jelas siapa ibunya. Seorang John Smith dipanggil "Mr. Smith" dalam percakapan yang menghormatinya, biarpun menghormatinya secara basa-basi. Di Indonesia keadaan-nya tidaklah demikian. Orang yang namanya hanya terdiri dari satu kata misalnya Soekarno dan Suharto bukan berarti orang yang berasal dari keluarga tidak/kurang terhormat. Seseorang yang, misalnya saja, bernama Ariel Heryanto akan lazim dipanggil "Pak Ariel", daripada "Pak Heryanto", sebagai panggilan yang menghormat. Karena itu di Indonesia, para John Smith atau Nancy Smith sering dipanggil "Mr. John" atau "Pak John" dan "Mrs/Miss/Ms. Nancy" atau "Ibu/Nona/Sdri. Nancy" sebagai panggilan menghormat.

Perbedaan sistematika dan fungsi penamaan di antara kedua kelompok masyarakat itu tidak banyak menimbulkan masalah jika saja kita tidak memasuki jaman yang memungkinkan dan sekaligus menuntut komunikasi internasional berteknologi tinggi. Komunikasi demikian sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian kaum elit Indonesia. Dalam tata komunikasi antar bangsa demikian terjadilah

hukum "yang kuat menang, yang lemah kalah". Orang-orang Indonesia, khususnya yang hanya mempunyai satu kata walau panjang untuk namanya seringkali mengalami kesulitan administratif dalam pelayanan umum tata komunikasi internasional yang formal. Mereka sering dihadapkan pada kesulitan memenuhi tuntutan kertas formulir atau mesin komputer yang hanya mau (atau bisa) melayani jasa jika diberi data *first name* dan *last name* orang yang bersangkutan secara lengkap.<sup>19)</sup>

Sehubungan dengan hal-hal di atas, menarik untuk diamati meningkatnya kecenderungan di antara beberapa anggota kelas menengah ke atas di Indonesia untuk mengikuti pola dan sistematika penamaan ala "Barat" jika ada peluang. Peluang demikian terse- dia, misalnya, lewat pranata sosial yang disebut "pernikahan". Sudah menikah, nama satu-satunya, atau kata terakhir dari nama sang suami diangkat menjadi "na-

19) Saya pernah menikmati beberapa cerita, tentang kesulitan sejumlah orang Indonesia, khususnya Jawa, untuk memperoleh pelayanan pemesanan tiket penerbangan internasional gara-gara orang yang bersangkutan hanya mempunyai satu kata untuk namanya. Dr. Bambang Kaswanti Purwa, linguist muda berotak cemerlang dari Universitas Katolik Atma Jaya, pernah berurusan dengan suatu jawatan pemerintahan di Amerika Serikat gara-gara ia dituduh melanggar hukum dengan memberikan data identitas pribadi yang palsu. Ia pernah mengisi sejumlah formulir pada kurun waktu yang berbeda-beda secara tidak konsisten. Walau namanya terdiri dari tiga kata, ia merasa kata terakhir pada namanya bukanlah *last name* atau *family name*, dan kata pertama pada namanya tidak secara eksklusif berfungsi sebagai panggilan informal.



ma keluarga". Nama itu dibubuhkan pada ekor nama istri dan anak-anak. Tentu saja kecenderungan mutakhir ini tidak hanya atau terutama dimaksudkan sebagai siasat mendapatkan kemudahan atau menghindari kesulitan dalam komunikasi internasional yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil kaum elit di Indonesia. Kecenderungan itu mungkin dapat dikaitkan dengan gelombang Westernisasi dan usaha meningkatkan gengsi berselera budaya "tinggi"<sup>20)</sup>

Masih soal "nama keluarga" ala "Barat" sebagai nama formal, praktek Westernisasi (yang dianggap "universal") juga dapat diamati dari kebiasaan membentuk petunjuk acuan dan daftar pustaka acuan di kalangan kaum ilmuwan di Indonesia. Acuan pada nama pengarang orang Indonesia yang

20) Dalam suatu perkuliahan Antropologi Pedesaan Asia Tenggara (Universitas Michigan, USA), Professor Peter Gosling menyinggung *penurunan* status sosial wanita modern-urban di beberapa wilayah Asia Tenggara dengan adanya praktek demikian. Pada masa lampau banyak istri Asia Tenggara tetap mempertahankan namanya sendiri. Dalam masyarakat Jawa ada juga kebiasaan merubah nama ayah dan ibu, setelah mereka beranak, dan nama yang baru dipusatkan pada nama sang anak. Justru kebiasaan "tradisional" yang sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, itu mulai populer di kalangan pembela gerakan wanita di "Barat". Sementara kebiasaan "tradisional" di Barat yang mulai ditinggalkan orang-orang Barat itu diambil alih kaum "moderen" di Indonesia. Romo Y.B. Mangunwijaya, meramalkan bahwa para isteri "moderen" di Indonesia akan mengikuti pola penamaan "moderen" di Barat yang juga sudah pernah menjadi "tradisi" di Indonesia itu (Humaini, 1985).

terdiri lebih dari satu kata *hampir selalu* diperlakukan sebagai nama orang-orang "Barat", walau hal ini kadang-kadang memang tepat. Kata terakhir pada nama itu dianggap sebagai "nama keluarga", atau nama formal, yang dipakai dalam acuan dan daftar pustaka acuan.<sup>21)</sup>

## BARAT DAN PRIBUMI

Di atas, telah beberapa kali disebutkan istilah "Barat" dengan tanda kutip (" "). Ada alasan yang cukup penting, dan perlu dijelaskan di sini. Embel-embel tanda-kutip itu barangkali dapat dikurangi pemakaiannya pada sisa karangan ini jika penjelasan tentang alasan pemakaian itu pada alinea-alinea di atas telah diberikan seperti di bawah ini.

Istilah "Barat" telah populer dalam Bahasa Indonesia, dan popularitas itu memberikan manfaat besar dalam komunikasi kita. Tetapi penggunaan istilah itu secara populer juga sering menyesatkan.

21) Memang tidak mudah bagi kita untuk melawan kebiasaan ini, setidaknya karena beraneka ragamnya sistematika penamaan orang-orang di Indonesia. Sebagian mempunyai "nama keluarga" dan sebagian lagi tidak. Dalam karangan ini penyusunan acuan saya bikin secara tidak seragam. Nama orang-orang "Barat" dan orang Indonesia yang jelas mempunyai "nama keluarga" saya perlakukan sebagai lasimnya penyusunan acuan. Nama orang-orang Indonesia yang jelas memilih nama depannya sebagai nama untuk diacu (misalnya Harimurti) dan mereka yang tidak jelas punya "nama keluarga" saya acu dengan cara yang kurang lasim (tanpa membalik urutan nama mereka).

Pengertian populer istilah itu biasanya menyama-ratakan watak/sifat/ciri segala manusia, *tata sosial* dan budaya yang sedang hidup atau pernah berasal dari masyarakat bermayoritas penduduk kulit putih, terutama di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Padahal dalam masyarakat-masyarakat tersebut terdapat keaneka-ragaman yang cukup besar. Dengan semakin gencarnya komunikasi internasional pada masa ini, pemilahan kategori "Barat" dan "Timur" secara kaku menjadi semakin kadaluwarsa.<sup>22)</sup> Tata dan gaya hidup serta orientasi nilai sosial-budaya yang berasal dari "Barat" kini sudah menjadi bagian kehidupan sebagian warga masyarakat (elit) kita. Begitu pula sebaliknya, walau dalam kadar kualitas dan proporsi kuantita yang jauh lebih kecil. Penggunaan istilah "Barat" dalam karangan ini terutama dimaksudkan sebagai apa yang sedang/pernah *dominan* dalam kehidupan masyarakat-masyarakat bermayoritas penduduk kulit putih, seperti misalnya di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Australia, atau apa yang secara dominan pernah kita ambil dari mereka, walau mungkin mereka juga pernah mengambilnya dari "Timur".

22) Bahkan lebih dari setengah abad yang lalu, kategori pemilahan demikian sudah ditolak oleh G.W.J. Drewes (1929) ketika ia membahas pengaruh peradaban "Barat" pada bahasa di kepulauan Hindia Belanda. Tulisnya: "... one must abandon the collective idea and return to the individual details, from the whole to the component parts, in order to trace the action of the penetrating forces in each separate sphere of life and to determine the results" (Drewes, 1929:127).

Khusus dalam bahasan tentang bahasa di sini, saya tidak bermaksud menilai sesuatu pasti negatif hanya karena hal itu berasal di masyarakat-masyarakat yang lazim disebut "Barat". Kritik terhadap pandangan mendasar tentang bahasa yang kini dominan di Indonesia dalam karangan ini, tidak didasarkan pada alasan bahwa pandangan dominan itu datang dari Barat. Kritik saya sendiri juga berasal dari pemikiran dari Barat.

Kritik itu saya ajukan karena saya mengikuti kelompok pandangan Kontekstualis, sedangkan pandangan yang dominan di Indonesia lebih dekat pada kategori kelompok Universalis. Jadi pertentangan kedua pandangan itu bukannya pertentangan "Barat" versus "Timur" atau "pribumi". Saya tidak sejalan-pikir dengan I. Suharno serta sejumlah ahli bahasa lain yang merasa perlu me-"nirbarat"kan ilmu bahasa di Indonesia bagi kepentingan bangsa Indonesia (Suharno, 1983b). Saya tidak yakin, usaha mereka sendiri bisa "nirbarat".<sup>23)</sup>

23) Bandingkan dengan kecenderungan serupa di bidang Kesusasteraan Indonesia mutakhir, seperti yang pernah ditafsirkan oleh Keith Foulcher (1978). Foulcher membahas kecenderungan beberapa sastrawan Indonesia pada tahun 1970an yang banyak memperhatikan dan memasukkan hal-hal yang "tradisional" dalam karya mereka dari perspektif "modern" (yang "Barat"). Hal ini dibedakannya dari pengalaman para sastrawan Indonesia sebelum jaman perang yang karya-karyanya juga berunsur-unsur "tradisional", tapi tanpa dipilih dengan sengaja atau disadari para sastrawan itu sendiri. Sangatlah sulit, kata Ludwig Wittgenstein (1980:78), bagi seseorang yang telah mengetahui suatu hal untuk bertingkah seakan-akan ia belum mengetahui hal itu.

Walau kategori pemilahan dua kelompok besar pandangan atas bahasa itu produk dari Barat, pandangan-pandangan atas bahasa yang "pribumi" di Indonesia bukannya tidak dapat diperbandingkan dengan pandang Kontekstualis yang berasal dari Barat. Dalam tinjauan berikut akan kita lihat betapa dekatnya pandangan "pribumi" dari sebagian warga masyarakat Nusantara dengan pandangan "Barat" dari kelompok Kontekstualis. Walau keduanya tidak dapat dikatakan sama persis, mungkin-mungkin sudah jelas dari uraian di atas bahwa pandangan kelompok Kontekstualis dari Barat itu dapat dikatakan memihak pada nilai dan kerangka pemikiran "pribumi". Tegasnya, baik di Barat maupun di Indonesia dapat kita jumpai pandangan - pandangan atas bahasa yang sedikit atau banyak mewakili kedua kelompok besar tersebut. Walaupun demikian, perkembangan kedua kelompok besar pandangan itu yang di Barat maupun yang di Indonesia tidak boleh dianggap mempunyai sejarah yang sama ataupun terpisah sama sekali. Perbedaan dan kaitan mutakhir di antara sejarah sosial kedua pandangan di kedua kelompok masyarakat tersebut patut mendapatkan perhatian kita, walau berikut ini hanya dapat diuraikan selintas-pintas.

Untuk menengok sejarah perkembangan pandangan-pandangan terpenting atas bahasa di "Barat" kita dapat memanfaatkan sejumlah hasil studi dan publikasi yang sudah tersedia. Di sini saya akan memanfaatkan uraian Williams (1977:21-44) seperti yang pernah

dijanjikan di awal tulisan ini, ditambah beberapa keterangan dari S.Wojowasito (1965) dan Peter H. Salus (1969). Yang sulit ialah mengamati sejarah perkembangan (khususnya pada kurun awal) sejarah perkembangan pandangan "pribumi" yang mendasar atas bahasa di Indonesia. Sebabnya telah disebutkan tadi: langka atau bahkan mungkin belum adanya bahan-bahan studi yang memadai tentang ini.

Menurut Williams, abad 18 merupakan kurun masa yang teramat penting dalam sejarah perkembangan pandangan mendasar atas "bahasa" di Eropah. Sebelum abad 18 pemikiran yang dominan (di Eropah) menganggap "bahasa" dan "kenyataan" sebagai dua hal yang saling terpisah. Sejak abad 18, pandangan demikian mulai dilawan secara mendasar. Karena itulah, menurut Williams, sejumlah besar pemahaman filosofis selama berabad-abad dikerahkan untuk menjelaskan hubungan di antara "bahasa" dan "kenyataan".<sup>24)</sup> Williams mencatat upaya terpenting Plato (429-348 SM) untuk mencari kaidah yang "benar" dalam penamaan sesuatu; apakah hubungan "kata" dan "benda" bersumber dari *alam* atau *konvensi*. Jawaban yang dipilih Plato bu-

24) Tetapi, menurut Williams (1977:22) juga pada masa yang lebih terdahulu (pra-Sokrates) pernah dikenal pemahaman atas kesatuan *logos*, yang memandang bahasa menyatu dengan berbagai tata kehidupan alam dan dunia, dengan hukum-hukum yang Maha Kuasa dan manusia dan dengan penalaran. Tetapi pandangan demikian telah tenggelam dan dilupakan banyak orang, karena sebab-sebab yang tidak dijelaskan oleh Williams.

kan salah satu dari kedua pilihan itu, tetapi pada "form", "essence", atau "idea" yang metafisikal (Williams, 1977:22). Pandangan Plato ini, seperti ditegaskan Williams, menjadi landasan pemikiran kaum "idealis" pada masa-masa berikutnya, yang saya kelompokkan sebagai pandangan Universalis.

Williams tidak langsung membandingkan pandangan Plato dengan pandangan pemikir pendahulunya, Sokrates (469-397 SM), maupun pemikir sesudahnya, Aristoteles (384-322 SM). Untuk memahami pandangan Sokrates, para ahli biasanya mengacu pada naskah *Cratylus*. Menurut Wojowasito (1965:31) Sokrates meyakini bahwa penamaan suatu benda "mula-mula harus sesuai dengan sifat-sifat daripada benda yang diberi nama itu"; dengan kata lain, tidak bersumber dari suatu "konvensi". Tafsiran Wojowasito ini nampaknya tidak setepat tafsiran Peter H. Salus (1969:14) maupun A.G. Van Hamel (1972:25) bahwa Sokrates sebenarnya tidak memberikan pandangan yang jelas atau pasti terhadap pilihan *alam* atau *konvensi* sebagai dasar kaidah penamaan sesuatu secara "benar".

Tentang pemikiran-pemikiran Sokrates, Aristoteles (1958:122) berpendapat bahwa Sokrates terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal etis dan mengabaikan tata alam secara menyeluruh dalam upaya mencari apa yang universal dalam persoalan-persoalan etis tersebut. Tapi Aristoteles sendiri juga bukannya tidak berpandangan Universalis, seperti yang dapat kita amati dari tulisannya *De Interpre-*

*tratione* yang diterjemahkan H.P. Cook dan dimuat dalam buku Peter H. Salus (1969:4):

*Words spoken are symbols of signs of affections or impressions of the soul; written words are the signs of words spoken. As writing, so also is speech not the same for all races of men. But the mental affections themselves, of which these words are primarily signs, are the same for the whole of mankind, ....*

Kalau kita mendapat kesan bahwa Sokrates, Plato maupun Aristoteles sama-sama dapat dikelompokkan pada kelompok pandangan Universalis kita perlu memperhatikan apa yang diungkapkan Peter H. Salus (1969:3) bahwa pada masa itu mereka hanya mengenal satu bahasa, yakni Bahasa Yunani. Yang jelas, dari para tokoh pemikir klasik itu, belum kita saksikan pendapat tentang kaitan yang tak terpisahkan di antara "kata" dan "benda" atau di antara "bahasa" dan "kenyataan".

Jika Plato menganggap kaitan itu hanya ada pada sumber inti kebenaran yang berada di luar kehidupan manusia di dunia, Aristoteles menganggap "bahasa" tunduk atau ditentukan oleh "pikiran" (Salus, 1969:14).

Pemikiran semacam itu di Eropah mulai secara mendasar dilawan oleh Johann Gottfried Herder (1744-1804) dan perlawanan itu dikembangkan lebih lanjut oleh William von Humboldt (1767-1835). Sumbangan pemikiran terpenting dari Herder dapat diperentangkan dengan pendapat Aristoteles. Seperti disebutkan sebelumnya, bagi Aristoteles "bahasa"

tergantung atau ditentukan oleh "pikiran". Bagi Herder, "bahasa" dan "pikiran" tidak dapat dipisahkan, bahwa "bahasa merupakan bentuk maupun isi pemikiran manusia" (Salus, 1969:13-14). Karena itu Herder yang tidak percaya bahwa bahasa merupakan "pemberian" (misalnya dari Tuhan) untuk manusia,<sup>25</sup> juga tidak percaya bahwa bahasa merupakan semacam alat (misalnya untuk memahami atau menyatakan "pikiran" atau "kenyataan") belaka bagi manusia (Williams, 1977:24). Pemikiran seperti itu dikembangkan lebih jauh oleh von Humboldt dengan menekankan sifat hakiki bahasa, yakni tidak pernah statis. Bagi von Humboldt, yang mungkin punya daya tarik khusus bagi kita, karena prestasi studinya tentang bahasa Kawi di Jawa; "*Language is not a work (ergon) but an activity (energeia)*" (Humboldt, 1969 : 184).

Kemajuan pemikiran yang tidak menilai "bahasa" sekedar sebagai "alat", tetapi kegiatan "konstitutif" seperti tersebut di atas dipandang Williams (1977:24) sebagai usaha penting untuk memahami sifat "manusiawi" pada "bahasa". Ini penting dalam menghadapi majunya perkembangan il-

mu alam dengan pendekatan analitis dan empiris. Kemajuan pemikiran itu juga penting bagi pemahaman daya "kreatif" manusia. Ini penting dalam mengimbangi kemajuan hukum - hukum sebab - akibat pada ilmu alam. Tetapi kemajuan pemikiran tentang bahasa itu juga senantiasa terancam oleh kecenderungan menjadi pemikiran kaum idealis yang mengunggulkan "Kemanusiaan" dan "Kreatifitas" (dengan huruf-besar K) sebagai induk atau inti hakiki dari seluruh persoalan kehidupan sosial, yang dipertentangkan dengan pemikiran materialisme "obyektif" (Williams, 1977:24). Sehingga pada abad 19 dan 20 kita saksikan pemisahan tajam di antara "kesenian" dan "ilmu" yang kurang menguntungkan.

Kemajuan dalam pemahaman atas hakekat dan fungsi "bahasa" pada abad 18 tersebut dihempaskan oleh beberapa peristiwa penting dalam dinamika sejarah politik di Barat pada masa berkembangnya penjajahan, sebagaimana dijelaskan Williams (1977:25-28), dan akan saya ringkas berikut ini. Yang kemudian menjadi dominan dalam studi tentang bahasa ialah ilmu pengetahuan empirisme yang mengabaikan sejumlah kemajuan dalam pemikiran amat mendasar pada masa sebelumnya. Studi tentang bahasa pada masa-masa lalu di Eropah kebanyakan dikerjakan dalam kerangka pemikiran studi bahasa-bahasa klasik yang sudah mati. Penjajahan Barat memungkinkan tersedianya sejumlah data tentang bangsa-bangsa terjajah, maka para ahli bahasa menerapkan model pemikiran yang telah

mapan itu dalam kerja studi mereka atas bahasa-bahasa bangsa terjajah. Sehingga yang muncul secara dominan ialah pandangan "obyektifis", sebab para ahli itu merasa harus mempertanggungjawabkan ke-ilmiahannya studi mereka mengenai "obyek" studi yang asing, berupa naskah-naskah kuno

yang mati dari khasanah tulis bangsa terjajah. Kalaupun para ahli itu pernah mencoba mempelajari bahasa lisan yang hidup di kalangan bangsa terjajah, maka studi mereka harus dipahami sebagai kegiatan dalam kerangka hubungan sosial di antara sang peneliti (bangsa penjajah yang super) dan pihak yang diteliti (bangsa terjajah yang inferior). Dan penilaian mereka didasarkan pada kaidah-kaidah bangsa penjajah yang super itu. Bahasa-bahasa kaum terjajah seakan-akan tidak memiliki dinamika logika dan kehidupan tersendiri atau yang lain dari model yang dimiliki bangsa penjajah.

Dengan demikian pemahaman atas bahasa sebagai suatu kegiatan yang dinamis dan konstitutif tertindih. Sebagai gantinya, yang menjadi jaya ialah studi dan pandangan atas bahasa (asing) sebagai suatu sistem yang obyektif.

Bahasa dipelajari dalam kerangka struktural dan intrinsik, atau (kaidah-kaidah) dalam "bahasa" itu sendiri. Bahasa yang hidup dalam suatu konteks sosial yang dinamis telah direduksi menjadi sekedar contoh-contoh dari sistem kaidah-kaidah yang terletak di luar kehidupan bahasa yang dinamis itu.

Pada awal abad 20, pemikiran demikian menjadi menyolok pada pemikiran Ferdinand de Saussure.

Menurut Saussure, pada hakekatnya bahasa merupakan suatu sistem (*langue*) yang stabil dan otonom, sedang kegiatan berbahasa yang nyata (*paroles*) merupakan kegiatan "individual" pemakai bahasa. Tugas ahli bahasa, menurut Saussure, ialah menjelaskan sejarah bahasa-bahasa di dunia, serta memetakan silsilah dan garis keturunan mereka, agar dapat dipahami kaidah-kaidah universal yang berlaku dan melahirkan ribuan bahasa-bahasa di dunia (Salus, 1969: 3). Pikiran Saussure disambut hangat oleh para ahli bahasa pada jamannya. Ini disebabkan karena para ahli itu memang sedang mengharapkan tersedianya pandangan mendasar mengenai ilmu bahasa "sebagai suatu ilmu otonom" untuk "membenarkan kemerdekaan ilmu bahasa" (Wojowasito, 1965:217-218). Sebab mereka merasa psikologi bahasa dan sosiologi bahasa merupakan ancaman.

Perkembangan pemikiran bahasa yang tersebut paling belakangan ini nampaknya merupakan contoh terbaik untuk mewakili kelompok besar pandangan Universalis yang terurai di atas. Pemikiran yang sudah mempunyai bibit-bibitnya pada abad-abad sebelumnya itu nampaknya merupakan pemikiran yang terutama diserap kaum terpelajar kita di Indonesia pada abad ini. Sementara pemikiran alternatif terhadapnya mulai bangkit kembali di Barat dan sudah, walau perlahan-lahan dan sedikit-sedikit

<sup>25</sup> Herder bukanlah orang pertama di Eropah yang menolak pandangan yang pernah mapan bahwa bahasa merupakan "anugerah" dari Tuhan. Menurut Williams (1977:23-24), Herder mengembangkan lebih lanjut pemikiran serupa dari Vico. Bahkan Peter H. Salus (1969:3) berpendapat Sokrates sudah pernah mengajukan penolakan serupa itu. Kalau bahasa diyakini tidak berasal dari Tuhan, maka pada dasarnya pemikiran itu secara potensial memandang bahasa tidak bersifat universal.



dikenal di tanah air pada tahun-tahun belakangan ini.<sup>26)</sup>

Pandangan bahwa bahasa "merupakan kurnia Tuhan yang diberikan kepada manusia" (Miska, 1985) ternyata masih hidup di Indonesia, walau mungkin tidak lagi terlalu populer di kalangan kaum terpelajar, dan tidak dengan sendirinya dapat dianggap berasal dari Barat. Pandangan bahwa bahasa merupakan semacam alat atau perkakas untuk menyatakan sesuatu yang terpisah dari alat/ perkakas itu, yakni pikiran dan/ atau perasaan juga masih tetap kuat di kalangan kaum terpelajar kita. Istilah "alat" atau "perkakas" kadang-kadang diperhalus atau dikramakan menjadi "sarana" atau "wahana". Pandangan demikian kadang-kadang terungkap secara eksplisit, walau seringkali secara implisit. Untuk jelasnya, berikut ini akan saya angkat contoh-contoh terungkapnya pandangan atas bahasa sebagai "alat" itu.

Salah satu buku pelajaran tata bahasa paling awal yang dikenal

26) Ulasan tentang sejumlah pandangan atas bahasa di atas tidak saja terbatas pada suatu wilayah kehidupan masyarakat di Barat, tapi juga terbatas pada sebagian kecil, yang saya anggap terpenting, dari apa yang terjadi di sana. Kononnya, di India juga telah tumbuh pemikiran yang maju sebelum tahun Masehi. Hal yang sama mungkin juga terjadi di Asia Timur (Cina dan Jepang) serta Timur Tengah pada masa kejayaan kebudayaan Islam. Karena terbatasnya pengetahuan saya tentang itu semua dan terbatasnya lingkup bahasan di sini, hanya pandangan yang paling berpengaruh pada kaum terpelajar di Indonesia masa ini yang dipertimbangkan di sini.

kaum terpelajar kita ialah buku S. Takdir Alisjahbana (1959) yang diawali dengan "batasan bahasa" sebagai "utjapan pikiran dan perasaan manusia dengan teratur dengan memakai alat bunji". Dalam batasan ini yang dinyatakan secara eksplisit sebagai "alat" ialah "bunyi". Tetapi jika kita amati lebih jauh uraian Alisjahbana, kita dapat mengamati pandangannya atas bahasa sebagai sesuatu yang hanya dibentuk, tergantung, atau ditentukan oleh pikiran/perasaan ("Tidak ada bahasa kalau tidak ada pikiran dan perasaan") sebagai yang pernah diyakini Aristoteles. Agaknya tidak terpicirkan olehnya proses yang sebaliknya juga: (tidak ada perasaan dan pikiran jika tidak ada bahasa) seperti yang pernah dikemukakan Herder. Pandangan bahasa sebagai kegiatan konstitutif nampaknya tidak dimilikinya; yang ada hanyalah sebagai instrumen: "Kalau seseorang berbicara, ia mengucapkan pikiran (atau) perasaan". Pandangan Alisjahbana atas bahasa sekedar sebagai alat terungkap secara eksplisit dalam tulisannya yang lain, ketika ia membahas:

Soal bahasa... sebagai alat untuk menjelmakan perasaan dan pikiran, sebagai alat untuk mendalami perasaan, menadjamkan pikiran dan menambah pengetahuan yang besar pula gunanya untuk menetapkan harapan dan tujuan dan teristimewa sebagai alat pergaulan dan perhubungan sesama manusia (Alisjahbana, 1957:17).

Pandangan demikian masih hidup cukup segar pada masa ini di kalangan kaum terpelajar kita. Pusat perhatian ilmu bahasa pada masa ini, menurut Anton M. Moeliono (1982:8), berdasarkan "anggapan bahwa pada hakikatnya bahasa itu wahana terpenting untuk mengungkapkan arti". Jadi seakan-akan "arti" sudah bisa terbentuk tanpa bahasa dan bahasa hanya sewaktu-waktu dibutuhkan jika ada orang yang hendak mengungkapkannya. Seakan-akan "kenyataan" hadir terpisah dari "bahasa"; yang kedua hanya berfungsi mengungkapkan yang pertama. "Bagaimana caranya bahasa mengungkapkan bahkan melambangkan struktur kemasyarakatan" menjadi pokok bahasan Anton M. Moeliono (1982:8), dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar bahasa pada Universitas Indonesia.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Daoed Joesoef (1983), bekas menteri P & K yang kini menjadi Ketua Dewan Direktur CSIS; ketika membicarakan "bahasa akademik" yang didefinisikan sebagai:

Sarana kebahasaan yang dipakai untuk mengkaji dan mengutarakan pikiran serta gagasan ilmiah. Jadi ia adalah alat komunikasi yang dipakai di lingkungan masyarakat ilmiah pada umumnya dan di kalangan pendidikan pada khususnya.

Untuk menyambut Kongres Bahasa IV, Gunawan Wibisono Adidarmodjo (1983) menulis sebuah karangan mengenai "fungsi bahasa sebagai alat komunikasi". Untuk mencapai komunikasi yang baik, ia berpendapat bahwa bahasa harus "dapat mengantarkan atau menyampaikan segala sesuatu yang dinyatakan oleh penutur serta dapat diterima oleh penangkap bahasa". Yang menarik, pernyata-

taan-pernyataan ini nampaknya bertentangan dengan gagasan bahasa sebagai pembentuk (bukan alat pengantar atau penyampai) pikiran yang dijadikan judul tulisannya.

Sewaktu diwawancarai Kompas (1985a) belum lama ini, Harsya W. Bachtiar menyatakan pemikirannya tentang "bahasa Indonesia.... merupakan alat komunikasi vital bagi bangsa ini". Pemikiran serupa dikemukakan oleh tiga guru Bahasa Indonesia dalam laporan wawancara yang sama. Sementara itu Jujun S. Suriasumantri (1985) menggolongkan fungsi-fungsi bahasa menjadi dua kelompok besar "yakni sebagai alat komunikasi yang bersifat ekspresif dan alat komunikasi yang bersifat argumentatif". Contoh-contoh ini dapat, tapi tak perlu, diperpanjang di sini.

Dengan mengamati contoh-contoh di atas kita tak dapat menutup mata pada contoh lain, walau pun sangat langka di kalangan kaum terpelajar Indonesia mutakhir, yang justru menolak pandangan dominan tersebut. Slamet Iman Santoso (1983) merupakan salah satu tokoh ilmuwan Indonesia mutakhir yang dengan sadar menunjukkan perlunya pemahaman bahwa "antara pemikiran dan bahasa ada hubungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan". Karena itu dapat dipahami jika beliau secara tandas menegaskan bahwa "Dalam pendidikan apa pun, fungsi bahasa tidak boleh dipandang hanya sebagai alat komunikasi. Sekali pun fungsi dasar", demikian ditulisnya walau saya kira yang di-

maksudkannya ialah salah satu fungsi dasar, "dari bahasa memang sebagai alat komunikasi".

Di atas telah kita amati bahwa di Barat pandangan yang menolak penurunan status bahasa sekedar sebagai alat berusia lebih tua (dua abad) daripada di Indonesia. Karena itu, tidaklah aneh jika publikasi pandangan atas fungsi bahasa sebagai kegiatan konstitutif dan tidak sekedar instrumental di kawasan Nusantara sudah sejak awal abad ini telah digarap seorang Eropah yang menjabat atase bahasa untuk Balai Pustaka yang didirikan pemerintah penjajah Hindia Belanda, yakni GWJ Drewes. Dalam tulisannya yang berbahasa Inggris dan diterbitkan di Batavia, Drewes (1929:127) menulis pernyataan-pernyataan seperti: "*the language is something more than the sounds which our organs of speech produce and even more than an instrument of thought*", juga "*a language is not an organism which develops independently*". Karena itu Drewes juga menolak pandangan yang memandang bahasa seakan-akan mempunyai kehidupan tersendiri yang otonom.

Di atas juga telah dijelaskan, bahwa walau pandangan seperti yang dikemukakan GWJ Drewes dan Slamet Iman Santoso itu telah berusia dua abad di Eropah, pandangan demikian tidaklah menjadi ciri unik maupun ciri dominan pandangan atas bahasa di Barat.

Pandangan atas bahasa di Barat nampaknya masih banyak dikuasai oleh jenis atau kelompok Universalis(bahasa sebagai alat) hingga

tahun-tahun belakangan ini. Karena itu, misalnya saja, pada pertengahan dekade yang lalu pikiran-pikiran Hans-Goerg Gadamer (yang ditulis sepuluh tahun sebelumnya) masih terasa penting untuk diterjemahkan dan diterbitkan di Amerika Serikat. Gadamer (1976:62-63) mengingatkan kembali bahwa "*We can only think in language*". Karena itu, menurut Gadamer, "*Language is not one of the means by which consciousness is mediated with the word... Language is by no means simply an instrument, a tool*". Maka, ia melanjutkan, "*Learning to speak does not mean learning to use a pre-existent tool for designating a world already somehow familiar to us; it means acquiring a familiarity and acquaintance with the world itself and how it confronts us*". Pada waktu yang tidak berbeda jauh, Williams (1977:24) menulis:

"*Language is.... a distinctively human opening of and opening to the world: not a distinguishable or instrumental but a constitutive faculty*".

Dengan demikian jelaslah bahwa pertentangan pandangan-pandangan di antara dua kelompok besar pandangan di atas bukan pertentangan pandangan Barat versus Timur. Pertentangan itu terdapat di masing-masing kelompok masyarakat. Pendapat ini mungkin lebih kuat jika kita dapat membuktikan secara mendalam kemiripan - kemiripan pandangan pribumi di Nusantara atas bahasa dengan pandangan atas bahasa dari kelompok Kontekstualis. Pembuktian demikian belum dapat

kita kerjakan dengan mudah dan disajikan dalam lingkup tulisan ini karena langkanya bahan studi untuk itu. Tapi beberapa keping informasi dapat dipandang sebagai sisa-sisa jejak yang sedikit atau banyak dapat membantu studi awal kita dalam pelacakan pandangan pribumi yang lebih mendalam di masa depan.

Seperti telah disinggung di atas, problema pertama dan utama kita jika hendak membuat perbandingan pandangan kita atas "bahasa" dan masyarakat lain ialah: apakah betul masyarakat bersangkutan memiliki "bahasa" dan dengan demikian juga pandangan atas "bahasa" itu. Hal ini perlu kita awasi, agar kita tidak terjerumus pada kecenderungan me-universalkan kategori "bahasa".

Yang dapat kita kerjakan ialah menyadari manfaat dan sekaligus resiko bahaya menerapkan sebuah kategori pemahaman (*framework*) untuk memahami kenyataan (*substance*) milik suatu kehidupan masyarakat yang mungkin tidak memiliki padanan kategori pemahaman demikian.

Baik dalam masyarakat Jawa lama mau pun Melayu lama, kategori "bahasa" dalam pengertian yang kita miliki tidaklah ada. Dalam bahasa Jawa kuno, dikenal istilah *bhāṣa* yang tampak mau pun artinya dekat, tetapi tidak sama dengan istilah "bahasa" milik kita kini. Kedua istilah itu mungkin berasal dari sumber yang sama: *bhāṣā*, dari bahasa Sanskerta. Tapi pengertian "bahasa" yang kini kita miliki nampaknya bersumber dari Eropah, dan men-

dekati, kalau bukan mengambil alih bulat - bulat, pengertian *language* dalam bahasa Inggris moderen.<sup>27)</sup> Pengertian *bhāṣa* dalam bahasa Jawa Kuno dijelaskan cukup berpanjang-lebar oleh P.J. Zoetmulder (1974:146-147 dan 1982:220). Menurut Zoetmulder, setidaknya-tidaknya ada dua kelompok (pengelompokan kategoris ini bimbingan Zoetmulder sendiri!) pengertian *bhāṣa*. Yang pertama mendekati pengertian "bahasa" sebagai yang kita pakai sekarang, dan yang kedua sebagai "*poem in kawin meters*". Bahkan pada kelompok pengertian yang pertama pun *bhāṣa* tidak berarti sama dengan "bahasa" dalam pengertian yang kita miliki. Pengertian *bhāṣa* tidak pernah terlepas dari pengertian orang/benda/hal tingkah-laku "terhormat". Pengertian demikian nampaknya masih bertahan pada istilah *basa* dalam bahasa (dan masyarakat) Jawa mutakhir.

27) Hal yang serupa dapat kita amati dengan istilah "sastra" seperti yang kita pakai dalam masa ini. Walau istilah itu berasal dari India, tapi pengertiannya tidak (jauh) berbeda dari pengertian *literature* dalam Bahasa Inggris moderen. Dengan menggunakan istilah "sastra" yang sudah berusia tua di Nusantara walau tidak "asli" untuk membicarakan "*literature*", orang bisa merasa seakan-akan tidak keBarat-Baratan. Dengan mengganti *substance* yang kelihatannya "pribumi" orang bisa merasa lebih nasionalis daripada rekan-rekannya yang sering memakai istilah asing dalam pergaulan, padahal *framework* untuk *substance* itu tetap produk bangsa (bekas) penjajah. Seorang rekan, Marthen aDoen, pernah berkata bahwa penjajahan mutakhir lebih sulit dilawan daripada penjajahan masa lampau, karena yang kini harus dihadapi ialah kekuatan bertampang pribumi se-bangsa sendiri.

Bentuk, tingkat dan kosa-kata penghormatan dalam bahasa Jawa mutakhir disebut *basa*. Memakai "bahasa" yang menghormati seperti itu disebut *ber-basa* (Wolff dan Poedjosoedarmo, 1982:5). Maka, jika kita memandang *basa* masyarakat Jawa itu sebagai "bahasa", kita dapat mengatakan bahwa dalam masyarakat itu "bahasa" tidak diperuntukkan bagi semua orang. Masyarakat itu tidak mengenal istilah/pengertian yang *netral*, *abstrak* dan *universal* seperti apa yang kini kita sebut "bahasa".

Dalam Bahasa Melayu Lama, istilah "bahasa" juga tidak dipahami sebagai sesuatu yang terlepas dari tingkah-laku atau sopan santun. Berdasarkan studinya atas naskah *Hikayat Hang Tuah*, Shelly Errington (1974:7) berusaha menjelaskan cakupan pengertian "bahasa" itu dengan menguras istilah-istilah padanan berbahasa Inggris "*religion, culture, manners, norms, and speech*".

Penjelasan Errington tentunya tidak dapat kita anggap sebagai terjemahan persis pengertian lama "bahasa". Penjelasan Errington bermanfaat untuk membantu kita memahami luasnya lingkup pengertian lama "bahasa". Pengertian "bahasa" yang berusia cukup tua itu masih tersisa pada pepatah "bahasa menunjukkan bangsa" yang pada abad ini mulai kurang populer. Bukan hanya karena kaum terpelajar kita sekarang kurang suka memakai pepatah Melayu lama, tapi juga karena istilah "bahasa" dalam pepatah tua itu

bahasa mutakhir mereka, dan tidak berarti sama dengan istilah "bahasa" dalam percakapan sehari-hari mereka.<sup>28)</sup> Kalau pun pengertian kita atas "bahasa" hadir dalam tata gagasan masyarakat Melayu Lama, maka hal itu hanyalah sebagian saja dari pengertian mereka tentang "bahasa" (Wilkinson, 1901:136). Dalam kamus Inggris-Melayu yang diterbitkan tahun 1939, R.O. Winstedt (1939:100) masih menerjemahkan *culture* sebagai "bahasa". Dalam konteks yang bersangkutan, terjemahan Winstedt itu boleh jadi merupakan terjemahan terbaik yang bisa dibuat orang. Tapi jika apa yang dimaksudkan dengan *culture* itu disamakan dengan *culture* sebagai istilah mutakhir atau "(ke)budaya (an)" yang kini kita kenal, maka kita bisa jadi bingung memahami penggunaan istilah lama "bahasa" dalam kalimat seperti:

La ilaha illa 'Allah; apakah bahasanya Tuanku begitu? Bukankah sudah patik sembahkan dahulu jangan Tuanku pakai seperti pakaian yang demikian ini.....<sup>29)</sup>

Uraian di atas memang belum secara jelas memberikan pemaha-

28) Istilah "bangsa" dalam pepatah yang sama juga tidak berarti sama dengan "bangsa" atau "nasion", atau "masyarakat" dalam bahasa kita masa kini. Karena itu ungkapan lama tersebut akan mempunyai pengertian yang sangat lain jika disampaikan kepada khalayak umum di Indonesia dalam Bahasa Indonesia masa ini.

29) Kalimat itu diucapkan Bujang Selamat kepada tuannya (keduanya tokoh dalam *Hikayat Anggun Cik Tunggal*), ketika mereka menyerang dan menaklukkan Komang. (Tahsin, *Omeng dan Selayan*, 1983:14)

man yang memadai bagi kita mengenai pandangan-pandangan mendasar di kalangan masyarakat pribumi Melayu atau pun Jawa tentang "bahasa". Namun, setidaknya, kita dapat mulai meraba dan merasakan selintas-pintas perbedaan kontras di antara pandangan pribumi seperti itu dari pandangan atas bahasa pada kelompok Universalis Indonesia maupun asing. Dalam pandangan pribumi itu "bahasa" tidak sekedar dianggap sebagai alat, dan tidak dianggap terlepas dari suatu "kenyataan" konkrit berkonteks tertentu. Sifat kegiatan berbahasa yang konstitutif dalam pandangan "pribumi" semakin nampak pada tradisi bermantera yang mereka miliki. Kata-kata diyakini bisa punya tenaga untuk menciptakan kenyataan, dan bukan sekedar alat untuk membicarakan kenyataan.

Dalam masyarakat Jawa, kata yang dipakai sebagai nama seseorang juga secara tradisional diyakini mempunyai tenaga yang berpengaruh pada kehidupan orang yang bersangkutan. Dalam masyarakat tersebut, nama-nama untuk orang diyakini mempunyai bobot daya/tenaga yang berbeda-beda. Seseorang yang dianggap menjadi *wong cilik* dianggap tidak boleh memiliki nama dengan bobot yang relatif berat. Kalau tabu ini dilanggar, sejumlah malapetaka dianggap akan menyulitkan kehidupan orang yang bersangkutan. Karena itu banyak anak di kalangan *wong cilik* yang diganti namanya jika sering sakit-sakitan. Masih hidupnya keyakinan seperti itu pada masa ini dapat diamati dari ejekan novelis Yudhistira Ardi Noegraha

dan reaksi negatif orang pada ejekan itu (Scherer, 1981). Keyakinan tradisional dalam masyarakat Jawa tentang bobot nama itu dapat dipertentangkan dengan pepatah mutakhir "apalah artinya sebuah nama!" yang diambil alih oleh sejumlah tidak kecil kaum terpelajar kita dari kalimat tenar "*What's in a name?*" yang ditulis William Shakespeare (1564-1616) dalam dramanya *Romeo and Juliet* di akhir abad 16. Pepatah itu diimpor bersamaan dengan gelombang pengaruh pandangan atas bahasa dari kelompok pertama.

Meremehkan kaitan antara nama dan orang/benda/kenyataan yang dinamai menjadi salah satu ciri menonjol pandangan kelompok Universalis itu.

Keyakinan adanya kaitan yang timbal-balik dan tak terpisahkan di antara "bahasa" dan "kenyataan" baik dalam pandangan pribumi kita, mau pun pandangan kelompok Kontekstualis di Barat memberikan alasan kepada kita untuk menyatukan mereka ke dalam satu kelompok besar. Tapi perlu disadari pula adanya variasi-variasi pandangan dalam setiap kelompok tersebut. Kaitan tak terpisahkan dan timbal-balik di antara "bahasa" dan "kenyataan" dalam pandangan masyarakat pribumi kita bisa dibedakan dari pandangan

Kontekstualis di Barat. Jika dalam pandangan pribumi kita kaitan itu dianggap bersifat "gaib" atau *supernatural* (istilah kategoris ini milik kita, bukan istilah pribumi) maka dalam pandangan kelompok Kontekstualis di Barat sejak abad 18 kaitan itu dianggap bersifat so-



sial-historis.

Jika hendak diperinci lebih lanjut, pada kelompok besar pandangan Kontekstualis juga pasti dapat kita temukan sejumlah variasi. Tapi dengan semua variasi itu, pembagian pandangan - pandangan atas bahasa menjadi dua kelompok besar seperti diuraikan di sini bukannya tidak bermanfaat. Dengan pengelompokan besar itu kita dapat memahami peta permasalahan kebahasaan di Indonesia masa ini. Dengan semua uraian teoritis yang mendasar di atas, akan lebih mudah bagi kita untuk membahas isu kebahasaan yang muncul ke permukaan sejarah pemikiran kaum intelektual mutakhir di Indonesia.

## BAHASA INDONESIA BAIK DAN BENAR

Besarnya bobot mau pun luasnya lingkup perhatian kaum terpelajar Indonesia pada isu Bahasa Indonesia yang "baik dan benar" sudah tidak perlu dijelaskan lagi dalam karangan ini. Dengan mengamati sekilas-pintas saja kita dapat merasakan kuatnya sikap normatif atau preskriptif pada kampanye bertaraf nasional tersebut. Dengan mempertimbangkan uraian teoritis pada bagian terdahulu dalam karangan ini, pengamatan yang sekilas-pintas saja pada kampanye itu juga sudah dapat membuahkan pemahaman baik tentang asumsi dasar mau pun dampak sosial - politik - ekonomi kampanye tersebut dalam masyarakat Indonesia. Dengan pengamatan sekilas, dapat dijelaskan termasuk dalam kelompok besar pandangan atas bahasa yang ma-

nahak landasan pemikiran kampanye tersebut. Tetapi jika ditimbang-timbang besarnya investasi untuk kampanye tersebut serta dampak yang diakibatkannya, kita perlu mengkaji isu tersebut secara lebih mendalam daripada sekedar memandangnya secara sekilas-pintas.

Untuk mengkaji lebih terperinci apa yang sebenarnya sudah dapat kita pahami dengan pengamatan selintas itu, kita perlu bersikap adil. Kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana para perintis dan pendukung utama kampanye itu menjelaskan pokok-pokok pikiran mereka dengan cara mereka sendiri, baik tentang pengertian bahasa yang baik dan benar maupun asumsi-asumsi dasar di baliknya.

Pada umumnya, pengertian bahasa yang "baik" dan pengertian bahasa yang "benar" dijelaskan sebagai dua hal yang berbeda, walau keduanya bukan tidak bisa didudukkan berdampingan. Perbedaan kedua pengertian itu dijelaskan secara eksplisit oleh Anton M. Moeliono (1977) dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai berikut:

....pada dasarnya, kita mungkin menggunakan bahasa yang baik, artinya yang tepat, tetapi yang tidak termasuk bahasa yang benar. Sebaliknya, kita mungkin berbahasa yang benar yang tidak baik penerapannya.....

Tidak dijelaskan olehnya apakah bahasa yang baik lebih penting daripada bahasa yang benar, atau sebaliknya, atau kedua-keduanya sama penting.

Pengertian bahasa yang "baik" dijelaskan oleh Anton M. Moeliono (1977) sebagai: "Pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian". Ia juga menambahkan bahwa bahasa yang baik dalam pengertiannya itu "tidaklah selalu perlu beragam baku". Pengertian serupa dijelaskan oleh Yus Badudu (1985) dengan kata-kata: "... bahasa yang dapat mengungkapkan pengertian secara tepat, tidak kabur, tidak bermakna ganda, cocok dengan situasi, dengan orang yang diajak bicara, dengan tempat di mana bahasa itu digunakan."

Pengertian bahasa yang "benar" dijelaskan oleh Anton M. Moeliono (1977) sebagai: "Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku...". Penjelasan itu tidak jauh berbeda dari penjelasan Yus Badudu (1985) tentang pokok yang sama, yakni bahasa yang "sesuai dengan sistem bahasa yang Anda gunakan".

Anton M. Moeliono (1977) merangkai kedua pengertian tersebut sebagai berikut: bahasa yang baik dan benar adalah "pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul".

Kajian yang mendasar atas kampanye pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu membutuhkan pemahaman yang memadai tentang asumsi-asumsi mendasar di balik kampanye tersebut. Dari se-

jumlah ulasan yang pernah dipublikasikan kita dapat mengamati serangkaian asumsi tersebut. Untuk memudahkan sistematika pembahasan, asumsi-asumsi yang saling berkaitan erat itu dapat digolong-golongkan menjadi tiga kelompok utama. Asumsi pertama, mengenai pandangan atas "bahasa", yakni adanya semacam nilai atau ukuran "baik" dan "benar" yang bersifat universal. Asumsi kedua, mengenai kenyataan berbahasa sebagian rakyat Indonesia yang dianggap belum sadar atau belum mampu berbahasa pada tingkat yang diidealkan secara universal tersebut. Asumsi ketiga, peran sekelompok warga elit dalam masyarakat yang berkuasa mengendalikan dinamika perubahan bahasa rakyat dianggap mutlak penting demi kesejahteraan rakyat banyak. Untuk jelasnya, serangkaian asumsi tersebut akan ditelaah secara lebih rinci.

Pandangan tentang adanya seperangkat nilai "baik" dan "benar" secara universal yang dijadikan asumsi pertama di atas terungkap dalam sejumlah ulasan beberapa tokoh ahli kita mengenai sejarah pertumbuhan bahasa-bahasa di dunia maupun Bahasa Indonesia pada khususnya. Beberapa contoh ini akan menunjukkan adanya sikap atau pandangan kesejarahan yang unilinier dan temporsentrik, yakni menilai dinamika kehidupan berbahasa berbagai masyarakat dari berbagai kurun jaman menurut ukuran nilai yang dimiliki si penilai pada kurun masa hidupnya sendiri. Perkembangan bahasa-bahasa dijelaskan secara

universal oleh Gunawan Wiradi (1984) sebagai berikut: "Semula tidak keruan, lama kelamaan semakin teratur". Pada proses perkembangan itu, menurutnya juga, "Kemudian timbullah orang-orang 'cendekia'... yang merenung dan berpikir... mengidentifikasi keteraturan-keteraturan itu, dan merumuskannya".<sup>30</sup> Sementara itu, Yus Badudu (1985) berpendapat bahwa Bahasa Melayu, yang menjadi induk Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa "yang miskin".

Bahkan menurut Yus Badudu, penggunaan Bahasa Indonesia pada dua dekade yang lalu "masih banyak sekali kesalahan.... Tetapi sekarang, penggunaan BI itu makin baik, makin mengasyikkan".

Karena diasumsikan adanya seperangkat nilai ("baik" dan "benar") berbahasa yang berlaku untuk berbagai konteks sosial-historis, maka diasumsikan pula nilai tersebut dapat digunakan untuk mengukur nilai kegiatan dan kemampuan berbahasa segala warga Indonesia pada masa ini dari ber-

30) Namun, Gunawan Wiradi menolak pendapat bahwa orang-orang "cendekia" yang muncul belakangan dalam sejarah itu adalah pengatur bahasa yang "semula tidak keruan" menjadi "teratur". Menurut-nya, proses perubahan itu "terjadi dengan sendirinya, tanpa perintah siapa pun". Dengan kata lain, dalam pandangan Gunawan, manusia adalah makhluk yang pasif dalam sejarah, yang tidak ikut menentukan perubahan sejarah (bahkan mungkin ditentukan oleh sejarah), dan hanya berpikir, merenung dan merumuskan sejarah (di luar gerak sejarah itu sendiri).

bagi konteks sosial. Di sini akan nampak, walau tidak selalu secara eksplisit, adanya pandangan yang kelas-sentrik, yakni mengukur nilai dinamika masyarakat sejaman berdasarkan ukuran nilai yang berlaku pada kelas sosial (dalam hal ini elitis) si penilai. "Ketrampilan untuk berbahasa baik dan benar", tulis Laksmi Dewanti (1985), "haruslah melingkupi segala golongan dan lapisan masyarakat di segala usia". Menurut Laksmi "kita sadar bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh bangsa Indonesia

sendiri pada waktu ini belumlah memadai". Apa yang dimaksud dengan istilah "kita" olehnya jelas terbatas hanya pada warga masyarakat Indonesia yang setingkat kelas sosial dengannya, sedang "bangsa Indonesia" adalah "mereka". Dari kelompok warga masyarakat yang tersebut belakangan ini ada yang "sangat disayangkan" oleh Laksmi, yakni "kekurang-sadaran" mereka "terhadap perbaikan bahasa nasionalnya".

Ramainya kampanye "agar kita memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar" menurut I. Suharno (1983a) disebabkan "karena kita sadar akan adanya bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar". Walau pun Bahasa Indonesia oleh Yus Badudu (1985) dinilai jauh lebih baik daripada Bahasa Melayu, tetapi ia berpendapat bahwa orang Indonesia sering "tidak menyadari kesalahan bahasa (kata yang tak tepat arti, bentuk kata atau susunan kalimat yang salah) yang digunakan itu".

Terlepas dari perbedaan penilaian

tentang tingkat kesadaran orang Indonesia pada "kesalahan" berbahasa mereka, ketiga pengamat bahasa di atas mempunyai keyakinan yang sama tentang menonjolnya "kesalahan" berbahasa sebagian atau sebagian besar orang Indonesia. Hal ini mengingatkan kita pada ucapan "rakyat masih bodoh" yang beberapa tahun lalu sering dituduhkan oleh sejumlah pemuka masyarakat di Indonesia.<sup>31</sup>

Kedua macam asumsi di atas, membantu kita memahami asumsi ketiga yang melandasi kampanye Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena "rakyat" dianggap "masih bodoh", tidak mampu berbahasa dengan baik dan benar, dan kadang-kadang tidak menyadari ketidak-mampuan itu, maka peran pembina Bahasa Indonesia ditampilkan sebagai pahlawan bangsa yang berjasa memberantas "kebodohan" rakyat. Dan karena para pembina tersebut merupakan sekelompok elit yang menikmati seperangkat kekuasaan sosial maupun ekonomis, maka kekuasaan mereka ditampilkan sebagai sesuatu yang sah dan dapat dibenarkan. Gagasan tersebut dipropagandakan dengan retorika yang kadang-kadang cukup "halus" dan simpatik, kadang-kadang secara blak-blakan. Tapi, semuanya sa-

31) Ucapan "rakyat masih bodoh" pernah disinggung Benedict Anderson (1966: 110) ketika membahas pengKramaan publik Bahasa Indonesia.

ma-sama mengatas-namakan demi kepentingan nasional. Anton M. Moeliono (1977) misalnya, dengan halus dan simpatik menjelaskan:

"Di Indonesia, mengingat kedudukan bahasa nasionalnya yang amat penting dalam peri kehidupan warga negaranya, ada badan pemerintahan yang ditugasi penanganan pembakuan bahasa. Namanya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa". Dengan semangat menggebu, Yus Badudu (1985) menjelaskan kegiatan pejabat yang diberi kekuasaan walau terbatas untuk mengendalikan pertumbuhan Bahasa Indonesia itu sebagai "para pejabat yang membaktikan dirinya bagi kemajuan bangsa, bagi kemajuan orang banyak". Untuk itu Yus Badudu mengharapkan penghargaan dari kita semua. Usaha pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia

tersebut tidak saja diharapkan, misalnya oleh Anton M. Moeliono (1977), dapat meningkatkan "gengsi dan wibawa" bangsa kita, dengan contoh model bahasa-bahasa Melayu Tinggi, Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol dan Italia. Lebih dari itu, ada yang menganggap usaha tersebut mutlak diperlukan untuk memungkinkan pemakaian bahasa yang "benar". Anggapan demikian tersirat dalam pernyataan Pamusuk Eneste, editor sastra dan bahasa Indonesia Penerbit Gramedia: "Bagaimana bisa berbahasa yang benar kalau belum ada standar.... seharusnya pusat Bahasa cepat menanggulangi masalah ini" (Kom-

pas, 1984).

## SALAH-PAHAM ATAS PAHAM YANG SALAH

Sebelum kita mempersoalkan "baik dan benar" atau tidaknya pengertian bahasa yang "baik dan benar" di atas beserta asumsi-asumsi mendasar yang dijadikan pijakannya, perlu dicatat dulu sejumlah tanggapan yang dapat dinilai sebagai kesalah-pahaman.

Yus Badudu (1985) pernah mengeluh, karena banyak pihak telah keliru menafsirkan isi kampanye pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalah-pahaman itu tampak paling menonjol dalam tafsiran beberapa pihak mengenai pemakaian bahasa baku. Banyak orang mengejek adanya pihak-pihak yang mengharuskan terpakainya bahasa Indonesia yang baku di sembarang tempat atau situasi, juga di pasar-pasar. Ejekan itu menurut Yus Badudu tidak mengenai jika ditujukan pada cita-cita asli pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai hal ini rasanya tidak ada yang perlu diperbantahkan. Yus Badudu benar dan patut mendapat simpati. Karena itu pula kita dapat memahami mengapa Yus Badudu merasa perlu mengulang-ulang kembali penjelasan tentang pengertian bahasa Indonesia yang "baik" sebagai bahasa yang "cocok dengan situasi".

Keluhan seperti itu tidak hanya datang dari Yus Badudu, tapi juga

dari beberapa pengamat lain. Menurut Harimurti (1982:30) "dewasa ini tersebar pengertian yang keliru tentang standardisasi. Orang sering menyamakan standardisasi dengan uniformasi." Anton M. Moeliono (1984:27-29) mau pun Abdussomad (1983) mengibaratkan kegiatan berbahasa yang baik dengan berpakaian yang baik: keduanya beraneka-ragam dan setiap ragam hanya cocok atau baik untuk situasi tertentu.

Pada pihak lain, sejumlah keluhan juga dinyatakan oleh pihak-pihak di luar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang diharapkan mendukung dan mengamalkan pesan dan pedoman berbahasa dari pusat tersebut. Sebab, pedoman resmi tersebut sering berganti-ganti. Keluhan semacam itu tidak dibantah, tetapi diterima atau dibenarkan oleh beberapa tokoh dari lembaga yang bersangkutan (*Kompas*, 1984).

Baik kesalah-pahaman khalayak maupun kekurangan dari pihak Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seperti diuraikan di atas bukanlah pokok utama perhatian kita dalam bahasan ini. Hal-hal tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan-kesalahan yang relatif kecil dan tidak mendasar. Kalau problema kampanye Bahasa Indonesia yang baik dan benar hanya dipahami sebatas persoalan-persoalan itu maka usaha perbaikan yang akan dilaksanakan juga cenderung terbatas pada hal-hal yang kurang mendasar itu dan status quo dapat dipertahankan. Kajian problema yang lebih mendasar berikut ini akan diusahakan men-

cakup pokok-pokok permasalahan seperti diuraikan di atas: (1) pengertian bahasa yang baik; (2) bahasa yang benar, dan (3) serangkaian asumsi dasarnya. Tetapi karena pokok-pokok permasalahan tersebut saling berkaitan, maka keterkaitan itu juga perlu diungkapkan, dan pokok-pokok tersebut tidak dibahas secara tegas sebagai pokok-pokok yang terpisah-pisah.

Pengertian bahasa yang baik yang telah dikampanyekan tersebut di atas telah memberikan suatu keluwesan pemahaman, dan mendekati pandangan Kontekstualis. Tetapi karena pendekatan tersebut tidak cukup mendalam atau radikal, sejumlah masalah masih tetap tersisa, baik yang dapat diamati segera dan bersifat praktis maupun yang bersifat lebih mendasar dan berjangka panjang.

Pengertian bahasa yang baik dalam versi pihak yang resmi tadi sudah mengakui batas-batas "kebaikan" pemakaian bahasa ragam baku, yakni dalam suatu situasi komunikasi tertentu saja, yang lazim disebut dengan istilah-istilah seperti "resmi", "formal" atau "ilmiah". Tetapi sejumlah masalah masih menjadi problematik yang tidak sepele karena pengertian-pengertian "bahasa baku" dan situasi komunikasi "resmi" tersebut masih dipahami secara statis. Seakan-akan "bahasa baku", bahasa "tidak baku", situasi "resmi" dan situasi "tidak resmi" merupakan kenyataan-kenyataan yang otonom dan berdiri sendiri-sendiri.

Yus Badudu (1985) misalnya, menilai bahwa kata "anggota" atau "mengenyampingkan" merupakan

bentuk yang salah dalam bahasa baku. Yang benar, menurutnya, ialah "anggota" dan "mengesampingkan". Anton M. Moeliono (1977) tidak menyalahkan penggunaan istilah-istilah "cewek", "ngelotok", "ngopi", dan "enggak" asal tidak dipakai dalam ragam bahasa baku, minimal untuk kurun masa ini. Jos Daniel Parera (1985) memperingatkan "jangan mengharapkan Jojon berbicara tentang harga pasar sama dengan analisis ekonomi Anwar Nasution". Dengan demikian kebakuan suatu ragam bahasa seakan-akan ditentukan oleh bentuk atau pun isi kebahasaan tertentu dalam kaidah-kaidah kebahasaan itu sendiri, bukan oleh konteksnya.

Dua masalah praktis dapat segera muncul. Pertama, karena bahasa ragam baku dan situasi komunikasi resmi dipahami secara statis sebagai dua kenyataan yang terpisah dan hanya bahasa ragam baku yang dirumuskan kebakuan-nya, maka bagaimana seseorang bisa memahami batas-batas ke "resmi"an suatu situasi komunikasi yang tidak pernah dibakukan dan dirumuskan keresmiannya? Dan jika tak ada batasan yang jelas tentang resmi atau tidaknya suatu situasi komunikasi, bagaimana seseorang bisa yakin ragam bahasa macam apa yang "baik" untuk dipakainya dalam situasi itu? Biasanya keresmian itu diidentifikasi dengan atribut-atribut material tertentu, misalnya ada pejabat tinggi, ada mikrofon, ada podium, ada bendera, ada dasi, ada sepatu, atau gedung megah. Tapi, benarkah ke "resmi"an atribut-atribut seperti itu bersifat intrinsik di dalam atribut-atribut itu sendiri?



ri? Jadi ke''resmi''an yang statis dan tidak ditentukan konteksnya?

Kedua, hubungan dialektis di antara ''bahasa'' dan ''kenyataan'' (yang ''resmi'' atau pun tidak) agaknya telah diabaikan atau diingkari dalam pandangan versi resmi mengenai bahasa yang baik. Mikrofon, podium, bendera, atau dasi yang dipakai dalam suatu perhimpunan orang bisa menjadi konteks bagi bahasa yang mereka pakai. Tapi begitu pula sebaliknya. Bahasa yang dipakai dalam suatu perhimpunan membentuk atau menjadi konteks makna benda-benda dan kenyataan sosial lain yang berada di sekitar pemakaian bahasa. Pandangan tentang pemakaian bahasa yang baik menurut versi resmi hanya menekankan perlunya memakai suatu ragam bahasa tertentu yang ditentukan atau tunduk pada ''situasi'' komunikasi tertentu. Pandangan tersebut melalaikan potensi bahasa sebagai konstitutif. Pandangan itu melalaikan kenyataan bahwa pemakaian suatu ragam bahasa tertentu juga menentukan dan membentuk ''situasi'' komunikasi yang ada. Jadi yang terjadi bukan hanya kita mesti berbahasa baku karena kita berada dalam situasi ''resmi'', tetapi sebaliknya juga: kita berada dalam situasi yang bisa menjadi resmi karena bahasa baku yang kita pakai me''resmi''kan situasi tersebut. Kalimat-kalimat yang telah ditetapkan secara resmi sebagai contoh kalimat baku bisa menjadi bagian dari berbahasa yang cocok di panggung lawakan, jika ternyata kalimat-kalimat itu menimbulkan gelegar gelak-tawa hadirin. Jadi tidaklah benar jika

bahasa Jojon akan pasti tidak baik jika sama dengan bahasa para ahli ekonomi atau ahli-ahli yang lain. Bayangkan jika Jojon berlagak meniru-nirukan bahasa para ahli itu. Istilah-istilah seperti ''enggak'', ''cewek'', atau ''ngopi'' juga tetap bisa menjadi bagian dari kegiatan berbahasa resmi secara baik pada kurun waktu ini. Misalnya saja, dalam komunikasi di pengadilan, atau pun dalam analisa tekstual bahasa dan sastra dalam forum ilmiah. Tulisan ''resmi'' Anton M. Moeliono (1977) yang bermaksud menolak pemakaian istilah-istilah tersebut dalam komunikasi ''resmi'' berbahasa ''baku'' terbantah oleh tingkah penulisnya sendiri yang menggunakan istilah-istilah itu dalam usaha menjelaskan penolakannya!

Secara lebih mendasar, pemikiran tentang bahasa baik yang memilah-milahkan sejumlah ragam situasi komunikasi pada prakteknya juga mengukuhkan kesenjangan sosial-politik-ekonomi yang ada dalam masyarakat kita. Uraian lebih lanjut tentang hal ini akan diberikan pada bagian yang berikut dalam tulisan ini.

Pengertian bahasa yang benar, pada hakekatnya berpusat pada permasalahan ketaatan mematuhi seperangkat kaidah yang dibakukan. Permasalahan tersebut paling banyak dihubungkan dengan kepentingan kegiatan keilmuan yang seringkali dianggap bersifat ''universal'', misalnya oleh Daoed Joe-soef (1983) atau Koentjaraningrat (1974:108). Dalam kaitan itu, bahasa hampir selalu dipandang sebagai ''sarana'', ''wahana'', atau

''alat'' belaka. Jujun S. Suriasumantri (1983) pernah berusaha bertahun-tahun ''mempengaruhi opini masyarakat untuk mengubah kata 'ilmu pengetahuan' menjadi 'ilmu' saja, sehingga terdapat padanan 'ilmu' untuk *science* dan 'pengetahuan' untuk *knowledge*'''. Agaknya ia ingin memperbaiki atau memilih secara lebih tepat ''alat'' untuk menyatakan suatu kenyataan yang obyektif. Tentang bahasa keilmuan, Anton M. Moeliono (1984:33) memandang bahwa ''orang mulai mengubah dan meninjau kembali adat kebiasaan berbahasa agar dapat disesuaikan dengan fakta-fakta yang diamatinya''. Padahal, terbentuknya apa yang disebut ''fakta-fakta'' sebenarnya juga tidak terlepas dari pembentukan ''bahasa'' tertentu.

Keilmuan mutakhir para cendekiawan kita yang datang dari Barat tidak terlepas dari sumbangan dan sekaligus keterbatasan bahasa-bahasa Barat yang hidup bersama dan saling menghidupi ilmu tersebut. Karena itu menuntut agar pertumbuhan bahasa keilmuan di Indonesia disesuaikan dengan kaidah-kaidah keilmuan juga sedikit atau banyak berarti menuntut tunduknya bahasa di Indonesia pada pola atau kerangka berbahasa di Barat. Mungkin hal itu merupakan suatu kepahitan yang sulit atau mustahil dihindarkan. Tetapi setidaknya tidaknya kepahitan demikian perlu diungkapkan, bukannya ditutup-tutupi dengan propaganda tentang ''bahasa'' yang berfungsi netral sebagai ''alat'' untuk menyatakan dan merumuskan pikiran dan fakta-fakta ilmiah yang dianggap ''universal''.

Masih kuatnya pandangan atas ilmu sebagai sesuatu yang netral, obyektif dan universal, serta pandangan atas bahasa sebagai alat di antara kaum terpelajar mutakhir kita membantu pemahaman kita tentang besarnya perhatian dan usaha yang telah mereka kerahkan terutama, tapi tidak hanya, untuk kepentingan keilmuan. Usaha tersebut tidak banyak menggali pokok permasalahan yang mendasar tentang ''bahasa'' dan ''ilmu'', tetapi terbatas pada usaha memperbaiki onderdil perkakas komunikasi keilmuan yang disebut ''bahasa''. Misalnya dengan menambah/mengganti kosa kata untuk menerjemahkan istilah teknis keilmuan dari Barat dan menata kembali tata kalimat dan karangan menurut ''logika'' (Barat!). Usaha itu memang tidak mudah. Tetapi bukan hal itu yang perlu dipersoalkan di sini. Persoalan utama mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa keilmuan yang layak kita perhatikan dapat dinyatakan dengan dua pertanyaan. Pertama, secara struktur-sosial maupun individual, pihak-pihak mana sajakah dalam masyarakat kita yang telah atau bakal dapat ambil bagian dalam kegiatan keilmuan tersebut?

Kedua, secara struktur-sosial maupun individual, pihak-pihak mana sajakah dalam masyarakat kita yang telah atau bakal berkesempatan atau berhak mengecap hasil dari perkembangan ilmu tersebut? Dengan hanya mengerahkan tenaga, anggaran, dan waktu besar-besaran pada usaha memperbaiki dan membenarkan ''bahasa'' untuk ''ilmu'', kita akan mengukuhkan status quo fungsi ilmu dalam

masyarakat kita: dari, oleh dan untuk kaum yang kaya dan berkuasa. Ilmu yang tidak "netral" makin dapat ditampilkan seakan-akan netral, berkat bahasa. Bahasa untuk ilmu yang tidak hidup sebagai bagian dari kegiatan sosial mayoritas warga bangsa, tapi dibuat dalam "kamar-kerja" ilmuwan dan linguist, semakin memperlebar kesenjangan sosial kaum elit terpelajar dan khalayak awam.

Dalam kaitan itu layak dipertanyakan juga keabsahan wewenang sekelompok warga masyarakat elit untuk mengendalikan dinamika kegiatan berbahasa masyarakat umum maupun masyarakat ilmiah. Siapa atau bahkan adakah di antara kita yang berhak menetapkan makna dan istilah "canggih", "rekayasa", "tari-kejang" atau tata ejaan dan bentuk tata kalimat tertentu sebagai bagian dari bahasa yang benar dan baku?

Dari mana datangnya hak tersebut? Secara polos, Anton M. Moeliono (1977) telah mengakui bahwa keabsahan dan hak demikian bersumber dari kekuasaan pemerintah. Tentunya, kekuasaan suatu pemerintah mana pun bukannya tidak boleh atau tidak dapat dipertanyakan, karena keabsahan itu tidak datang dari Tuhan atau pun peristiwa alam.

Itu sebabnya, pendapat yang selama ini telah banyak atau sering kita dengar bahwa bahasa terbentuk dari suatu konvensi atau perjanjian juga patut dipertanyakan. Begitu juga pemikiran bahwa benar atau tidaknya suatu bahasa

ragam baku seharusnya bersumber dari "logika". Sebab, seperti dijelaskan oleh Anton M. Moeliono (1984:20) dengan cukup gamblang:

Pada dasarnya ada tata bahasa yang baku karena ada golongan yang berpengaruh atau yang berwibawa, yang menetapkan sebagai patokan. Juga dalam hal ini tidak diadakan pemungutan suara sehingga akhirnya suara mayoritas harus berkuasa.<sup>32)</sup>

Baik atau benarnya suatu bahasa tidak ditentukan oleh unsur-unsur obyektif dalam bahasa itu sendiri, tetapi oleh ketentuan penguasa atau lembaga lain yang diberi kuasa olehnya. Dengan pemahaman seperti itu kita bisa mempelajari bagaimana pembentukan istilah dan makna mutakhir dalam bahasa (misalnya "diamankan", "stabilitas", "canggih", "rekayasa", "tari-kejang", atau "kumpul kebo") bisa mendukung kepentingan politis pihak-pihak tertentu yang berkuasa dalam masyarakat.

<sup>32)</sup> Bagian akhir dari pernyataan Anton M. Moeliono ini dapat mengundang perdebatan. Kekuasaan tidak selalu bersumber dari "suara mayoritas", tapi juga bisa berasal dari kekuatan-kekuatan lain yang bisa menekan "mayoritas" untuk ber"suara" tertentu demi kepentingan pemilik kekuasaan. Bagaimana pun juga, inti pesan Anton M. Moeliono patut mendapat penghargaan kita. Pesan yang penting itu justru luput dari pemahaman Keraf, ketika ia membuat tinjauan atas buku Anton M. Moeliono: "Bahasa sebagai suatu sistem komunikasi merupakan hasil suatu konvensi antar-anggota masyarakat bahasa itu. Konvensi atau kesepakatan anggota masyarakat itu...." (Keraf, 1984).

kat.<sup>33)</sup>. Tentu saja, pemahaman mendasar tentang ketidak-pernah-netralan suatu bahasa tidak selalu dapat membantu kita menjelaskan fungsi praktis sejumlah besar kata, kalimat atau makna yang diresmikan sebagai bagian dari bahasa baku. Sebagian besar penguasa juga tidak mampu, kalau pun seandainya mau, menguasai secara total bahasa, rakyat, atau pun kekayaan alam yang berada di bawah wewenangnya. Setidak-tidaknya pemahaman tentang tidak mungkin pernah bebasnya "bahasa" dari kepentingan-kepentingan politis sejumlah warga masyarakatnya menjadi teramat penting bagi suatu masyarakat yang telah dikuasai pandangan atas bahasa dari kelompok Universalis.<sup>34)</sup>

Tetapi harus kita ingat pula, para pemegang kekuatan sosial, besar-menengah-atau kecil, tidak dapat disama-ratakan atau dianggap sebagai suatu kelompok pengendali kekuasaan yang terpadu.

Dalam banyak kasus, justru yang terjadi sebaliknya. Mereka terpecah-pecah dan berorientasi pada

<sup>33)</sup> Lihat juga (Ariel, 1985) mengenai pokok yang sama.

<sup>34)</sup> Belum lama ini Lukman Ali (1983), salah satu tokoh ahli bahasa Indonesia yang pernah menjabat kedudukan di Pusat Bahasa dan KBRI Kuala Lumpur, menulis esei mengenai soal yang tidak baru: pembentukan Ejaan Yang Disempurnakan. Ia menulis bahwa proyek pembentukan Ejaan Yang Disempurnakan itu merupakan usaha yang "bertolak dari kebutuhan bahasa Indonesia sendiri" dan bukan usaha para ahli bahasa yang "mempolitikkan kegiatan ilmiah".

pusat-pusat kekuatan yang berbeda-beda. Kontradiksi selalu menyertai setiap bagian kehidupan kita. Ketegangan dan persaingan di antara mereka bukannya sesuatu yang jarang terjadi, termasuk dalam soal bahasa. Anton M. Moeliono (1977 dan 1984:29) sebagai seorang tokoh ahli bahasa mengeluh karena pemegang kekuatan formal dalam pemerintahan sering tidak berbahasa seperti yang diresepkan para ahli kita. Ia mengharapkan agar "kemahiran berbahasa" dijadikan "salah satu prasyarat kenaikan pangkat bagi pegawai negara dan anggota angkatan bersenjata" seperti di jaman kolonial Belanda. Harapannya itu disadari belum cukup cerah, karena menurut pengamatannya "di Indonesia *kattebelletje* atau *backing* lebih ampuh daripada ijazah kemampuan berbahasa sebagai prasyarat untuk masuk "khalangan yang berkuasa."<sup>35)</sup> Pembinaan dan pengembangan baha-

<sup>35)</sup> Banyak ahli bahasa yang kerja dan kedudukannya disponsori pemerintah merasa dikecewakan oleh banyaknya pejabat pemerintahan yang tidak berbahasa sesuai dengan resep para ahli itu. Contoh yang paling menonjol adalah lafal *-ken* dan *semangkin* untuk akhiran *"-kan"* dan kata *"semakin"*. Ada contoh-contoh lain mengenai ketegangan di antara kaum menengah-atas. Walau istilah *"tari kejang"* berasal dari lapisan atas masyarakat, tapi korban utamanya bukanlah rakyat dari lapisan bawah (yang memang tidak banyak *berbreak dance*). Bahasa *"mbeling"* dan *"prokem"* kaum remaja dalam media-massa juga bukan gerakan rakyat paling bawah, walau bahasa itu merupakan pembangkangan terhadap keabsahan wewenang sekelompok elit dalam menguasai kegiatan berbahasa masyarakat (Ariel, 1985).

sa, juga membutuhkan *backing* untuk mencapai tujuannya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, sebenarnya kita sudah mulai mempersoalkan juga beberapa asumsi dasar yang dijadikan landasan kampanye Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Beberapa asumsi lain yang belum terurai secara eksplisit dapat semakin dipertegas berikut ini.

Kita dapat mempersoalkan *kepentingan* kampanye yang dihubung-hubungkan atau diatas namakan demi kepentingan nasional atau rakyat banyak. Sementara Yus Badudu (1985) berbicara tentang Bahasa Indonesia sebagai "bahasa kita" dan bahasa "yang digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku", *Kompas* (1985b) melaporkan hasil suatu survei oleh P.W.J. Nababan dan Tony S. Rachmadie bahwa, pada tahun 1980-1981, lebih dari 88% penduduk Indonesia tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama.

Kita juga perlu mempertegas persoalan asumsi kampanye bahwa banyak orang Indonesia yang berbahasa secara tidak baik dan tidak benar, demi diabsahkannya usaha kampanye untuk memperbaiki dan membenarkan bahasa mereka. Yang menarik, walau asumsi seperti itu juga dipakai Yus Badudu (1985), tetapi ia mempunyai suatu pandangan: "Anda jangan hanya melihat kepada orang yang belum menguasai BI [Bahasa Indonesia] dengan baik", sebab katanya lagi, "mencari kesalahan dan kekurangan sangat mudah". Ucapan

itu tentu saja tidak ditujukan kepada pihak-pihak yang mengkampanyekan Bahasa Indonesia baik dan benar menurut versi resmi, tetapi kepada para penyanggah dan pelontar kritik atas kampanye itu sendiri.

Akhirnya, perlu dipersoalkan secara tegas pula asumsi tentang peran dan kedudukan para pembina dan penyumbang resmi pembakuan bahasa Indonesia, yang oleh Yus Badudu (1985) dikatakan sebagai orang "yang bekerja tanpa pamrih.... membaktikan dirinya bagi kemajuan bangsa, bagi kemajuan orang banyak...." dan "harus kita hargai". Selama berabad-abad masyarakat di seluruh kepulauan Nusantara ini hidup berbahasa dan berbahasa yang hidup. Mereka menghasilkan sejumlah kejayaan (di samping sejumlah kekalahan) dan prestasi kebudayaan (walau bukan tanpa korban) yang dibangga-banggakan sebagian besar bangsa Indonesia kini. Semua itu dihasilkan tanpa ada pembakuan bahasa yang dikendalikan dari "pusat". Jadi tidaklah benar jika diasumsikan seperti oleh Pamusuk (*Kompas* 1984) bahwa orang tidak bisa berbahasa dengan benar kalau belum ada standardisasi bahasa. Justru standardisasi bahasa, setidaknya-tidaknya dalam konteks seperti masyarakat mutakhir kita, melumpuhkan kekuatan atau daya hidup dan mobilitas sosial-politik-ekonomi masyarakat luas. Sebab, bukan saja dalam waktu yang cukup panjang mereka tidak bakal mampu menadah/membeli komoditi massal yang disebut bahasa Indonesia baik dan benar itu. Tapi dengan adanya sistem produksi berbahasa

semacam itu kehidupan masyarakat luas jadi tergantung, atau ter tekan oleh praktek standardisasi tersebut.

Dengan jitu Ivan Illich (1980: 44) melukiskan hakekat dari peristiwa yang diakibatkan oleh proses peralihan kehidupan berbahasa yang semula dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan penguasa pusat, menuju ke kehidupan berbahasa yang diatur dan diajarkan dari "atas".

*As language teaching has become a job, it has begun to cost a lot of money. Words are now one of the two largest categories of marketed values that make up the gross national product (GNP). Money decides what shall be said, who shall say it, when and what kind of people shall be targetted for the message.... In schools people learn to speak as they should. Money is spent to make the poor speak more like the wealthy.....*

Proses peralihan kehidupan berbahasa itu dipahami secara mendasar oleh Illich (1980:37) sebagai awal dari proses kegiatan lain yang serupa: peralihan menyusui anak dengan buah dada menjadi dengan susu botol. Dari kehidupan ekonomi *subsistence* menuju *welfare*. Dari kegiatan produksi untuk dipakai bagi pemenuhan kebutuhan sendiri menjadi produksi untuk pasar. Padahal, ada yang lebih parah dan serius dari semua itu. Illich (1980:39) menggunakan peringatan Dante (1265-1321) bahwa bahasa yang mesti dipelajari, yang mesti patuh pada tata bahasa, tidak bisa tidak merupakan bahasa yang mati.

#### KEKUASAAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Dalam bagian penutup untuk

tulisan ini akan disimpulkan beberapa inti permasalahan yang telah terurai di atas, khususnya hal-hal mengenai kaitan tak terpisahkan di antara kekuasaan, bahasa, dan perubahan sosial. Pada bagian terakhir karangan ini juga akan dipertegas perlunya mengkaji kembali pokok-pokok pikiran tentang kebahasaan yang kini dominan di Indonesia.

Apa yang pernah ditulis Benedict Anderson dua dekade yang lalu mengenai perkembangan mutakhir Bahasa Indonesia agaknya masih dapat diamati pada masa ini. Waktu itu ia menulis tentang Jawanisasi Bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan sejumlah krisis sosial-politik-ekonomi di Indonesia sejak 30 tahun yang lalu. Apa yang dimaksudkan Anderson dengan Jawanisasi bukanlah "*cultural imperialism of the Javanese*" seperti yang mungkin pernah disebut-sebut orang, melainkan suatu proses perubahan sosial yang rumit dan kompleks. Proses itu, menurut Anderson, antara lain ditandai oleh ketidak-berdayaan Bahasa Indonesia sendiri sebagai modal kerangka berpikir mutakhir. Menurutnya pula, proses itu menampilkan sejumlah wajah yang dapat diamati: (1) peng-Krama-an publik Bahasa Indonesia; (2) timbulnya Ngoko baru dalam Bahasa Indonesia; (3) memudarnya watak revolusioner dari Bahasa Melayu *lingua-franca*; (4) kebangkitan kembali citra ke-Jawa-Jawa-an dalam kancah politik (Anderson, 1966:109-115).

Dalam batas tertentu, pertumbuhan pemikiran Bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut saya



dapat dipahami dalam kerangka sejarah-sosial seperti yang pernah diajukan Anderson. Yakni Bahasa Indonesia yang dianggap baik dan benar sebagai bahasa "halus" atau Krama bagi kaum terpelajar atau "priyayi" mutakhir. Sedangkan bahasa yang dianggap tidak baik dan tidak benar dapat dibandingkan dengan bahasa Ngoko yang "kasar". Ke-Krama-an Bahasa Indonesia mutakhir oleh Anderson (1966:111) pernah dibandingkan dengan ke-Krama-an Bahasa Jawa Krama: terserapnya istilah-istilah tua, dari bahasa Sanssekerta dan Jawa Kuno yang disertai konotasi kernuliaan, kejayaan dan gengsi tinggi. Bahasa Indonesia dari masa revolusi yang pernah mempersatukan kaum antipenjajah, oleh Anderson dicatat sebagai bahasa yang tidak mempunyai akar mendalam secara batiniah bagi sebagian besar warga Indonesia. Kekuatan bahasa tersebut, menurut Anderson (1966:105 - 106) segera mengempes setelah kekuatan penjajah asing itu berakhir. Proyek pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia pada masa ini bukannya menumbuhkan akar-akar batiniah kebahasaan tersebut, malah semakin memformalkan, mengeringkan, dan menjauhkan kehidupan batiniah masyarakat dari bahasa nasionalnya. Semua ini diselenggarakan demi tercapainya peningkatan gengsi lembaga, para pejabat dan pranata sosial "resmi" serta kegiatan "ilmiah" dan administrasi/teknokratik proyek "Pembangunan" yang efisien.

Untuk melengkapi wawasan pemahaman kita pada gejala-gejala

kebahasaan mutakhir tersebut, ada baiknya kita menengok sekilas tiga peristiwa penting. Pertama, sejarah pertumbuhan awal Krama dan Ngoko dalam bahasa Jawa. Kedua, sejarah bibit-bibit pemikiran tentang standardisasi bahasa nasional di tanah air ini. Ketiga, salah satu contoh tertua sejarah awal pembakuan atau standardisasi bahasa di Eropah. Dari pengamatan atas ketiga peristiwa yang ikut memberikan sumbangan sendiri-sendiri pada pertumbuhan kebahasaan di Indonesia mutakhir itu akan tampak betapa besar peran kekuasaan dan kepentingan penguasa dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sejarah timbulnya Krama-Ngoko Bahasa Jawa pernah diuraikan, antara lain, oleh Benedict Anderson (1982:76-78) dan G. Moedjanto (1985). Kedua sarjana itu menyam-paikan uraiannya dengan gaya dan kerangka pandangan yang tidak seragam. Tetapi inti-inti pendapat mereka mengenai sebab-musabab awal timbulnya Krama-Ngoko dalam Bahasa Jawa bersifat saling mendukung. Menurut Anderson (1982:76-77), Krama sebenarnya merupakan "penggunaan yang dibikin-bikin terhadap..... bahasa yang.... lazim di kalangan orang Jawa". Dan, Bahasa Jawa Krama itu terbentuk karena memang dengan sadar dibentuk para penguasa Jawa sesudah abad 18 sebagai "kompensasi dari hilangnya kekuasaan kongkrit". Tentang masa awal timbulnya Krama-Ngoko dalam Bahasa Jawa, G. Moedjanto mempunyai pendapat yang sedikit berbeda. Menurut G. Moedjanto (1985:278,295) hal itu sudah mulai terjadi secara menonjol pada abad

17. Tetapi mengenai sebab-musabab terjadinya tingkat-tingkat berbahasa Jawa itu, pendapat Moedjanto dan Anderson tidak saling berbeda. Dalam kata-kata Moedjanto (1985:271): "tataran ngoko-krama memang sengaja dikembangkan, sehingga menjadi rumit, sebagai alat politik, justru karena dinasti Mataram menyadari dirinya berasal dari kalangan petani". Terciptanya tingkatan bahasa itu digunakan oleh penguasa Jawa yang bersangkutan untuk menaikkan derajatnya, untuk menciptakan "jarak sosial" (menurut istilah Moedjanto) di antara mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Dengan demikian uraian Anderson maupun Moedjanto mendukung pandangan kelompok Kontekstualis: berbahasa sebagai kegiatan sosial yang berdaya konstitutif. Bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi untuk membicarakan tentang "kenyataan", tetapi juga mendesakkan terbentuknya "kenyataan" 36).

36) Pandangan yang sedikit atau banyak mewarisi atau mewakili pandangan atas bahasa dari kelompok Universalis pasti menjelaskan gejala ini secara lain. Bahasa dijelaskan sekedar sebagai "cermin" atau "pantulan" atas kenyataan (yang dianggap terbentuk di luar kegiatan berbahasa). Perhatikan, misalnya pernyataan Maurits D.S. Simatupang (1983) pada pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia: "Adanya ragam Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil dalam bahasa Jawa, misalnya, merupakan refleksi struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat Jawa". Pandangan demikian sesuai dengan pandangan Simatupang yang memandang bahasa sebagai "cara dan alat" untuk berkomunikasi. Tetapi pandangan itu agak bertentangan dengan usahanya membicarakan "Aspek Sosial Budaya Dalam

Pembakuan Bahasa Indonesia menuju ke bahasa yang dianggap baik dan benar memang tidak dapat dianggap sama persis dengan penciptaan Bahasa Jawa Krama, walau dampak sosial-politik-ekonominya dapat diperbandingkan. Karena itu, perbandingan tersebut akan lebih lengkap jika disertai pula dengan perbandingan lain seperti yang telah saya sebutkan di atas.

Perbandingan berikut diambil dari peristiwa di Nusantara sendiri yang terjadi pada Bahasa Melayu di masa penjajahan Hindia Belanda. Sudah cukup banyak pihak di antara kaum terpelajar kita yang membahas keputusan pemerintah penjajah Hindia Belanda yang menetapkan Bahasa Melayu Tinggi sebagai semacam bahasa baku yang baik dan benar. Anton M. Moeliono (1977) misalnya, menjelaskan kedudukan dan fungsi Bahasa Melayu Tinggi itu sebagai "bahasa baku atau bahasa standar... Ragam ini tidak saja ditalaah dan diperikan, tetapi juga diajarkan di sekolah". Tidakkah berlebihan jika Anton M. Moeliono (1977) menulis bahwa "bahasa Melayu Tinggi dikenal juga sebagai bahasa sekolah". Jadi bukan bahasa yang hidup dalam sebagian besar warga masyarakat, yang menghidupi dan dihidupi oleh mereka.

Berbahasa" yang dijadikan judul pidatonya. G. Moedjanto sendiri di satu pihak menunjukkan timbal-balik di antara bahasa dan kehidupan sosial (Moedjanto, 1985:295) dan di pihak lain berpandangan bahasa "merupakan pantulan dari" kenyataan sosial (Moedjanto, 1985:299).

Keputusan pemerintah Hindia Belanda tersebut bukanlah sekedar keputusan menurut pertimbangan ilmiah kebahasaan. Tetapi hasil dari suatu pertimbangan politik untuk mengukuhkan kekuasaannya. Benar, keputusan itu kemudian ikut berjasa mempersatukan kaum terpelajar pribumi yang bersekolah. Tapi juga memperlebar jurang pemisah di antara kaum terpelajar itu dengan kehidupan sebagian besar rakyat pribumi di lapisan bawah. Bahasa Melayu Rendah pernah mempersatukan kaum terjajah dan membangkitkan kekuatan anti-penjajah yang berwatak "pribumi". Bahasa Melayu Tinggi merupakan bahasa birokrat yang pertumbuhan dan pengajarannya (di sekolah-sekolah) dikendalikan oleh pemerintah penjajah. Pengendalian ini pasti tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan si pengendali. Pengendalian itu sedikit atau banyak menghasilkan suatu benteng pertahanan bagi kekuatan penjajah. Lebih jauh lagi, benteng tersebut berwajah pribumi. Sehingga benteng ini bukan saja sulit untuk diamburkan, tetapi bahkan sulit untuk dikenali sebagai benteng musuh (asing) yang perlu dilawan.

Didirikannya *Commissie voor de Volkslectuur* (1908), yang kemudian disebut Balai Poestaka (sejak 1917), oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda layak mendapat perhatian utama dalam pokok persoalan tersebut belakangan. Lembaga ini penting untuk diperhatikan setidaknya untuk dua alasan utama. Pertama, seperti pernah ditulis oleh Sapardi Djoko Damono (1984:14), lembaga ini

"tidak sekedar menyediakan bacaan bagi orang muda, tetapi juga mengarahkan mereka ke suatu sikap yang tidak membahayakan pemerintah" penjajah Hindia Belanda. Kedua, lembaga yang sama penting untuk diperhatikan karena perannya sebagai salah satu bentuk formal tertua pembakuan bahasa di Nusantara ini oleh penguasa pemerintah pusat, sebagaimana dijelaskan Anton M. Moeliono (1985:17,90). Tindakan pemerintah penjajah yang bermaksud mempengaruhi kaum terpelajar muda pribumi "ke suatu sikap yang tidak membahayakan pemerintah" penjajah itu bukannya tanpa alasan. Pada masa itu (awal abad 20), bukan saja sedang bertumbuh kesadaran nasionalisme di kalangan kaum terjajah yang bersekolah. Tetapi juga sedang berkembangnya penerbitan buku-buku yang menentang kepentingan politik pemerintah penjajah, dan terbit dalam bahasa Melayu Rendah. Dengan demikian, proyek lembaga yang disponsori pemerintah penjajah itu tidak sekedar menerbitkan buku-buku dalam bahasa yang diresmikan sebagai bahasa baik dan benar, tetapi juga sekaligus menertibkan bahasa dan pikiran kaum terjajah yang telah hidup dalam masyarakat, yang menghidupi dan dihidupi mereka. Tampilnya wajah "pribumi" dalam operasi politik bahasa tersebut tampak juga pada keterlibatan beberapa intelektual pribumi baik dalam penulisan maupun staf redaksi penerbitan buku-buku bacaan oleh lembaga tersebut.

Contoh terbaik dari keadaan yang tersebut belakangan itu tam-

pil pada penerbitan roman *Sitti Noerbaja* (1922), yang ditulis oleh seorang pribumi dalam bahasa yang pada waktu itu dianggap "baik" dan "benar". Novel yang dalam sejarah kesusasteraan Indonesia moderen versi resmi warisan pemerintah penjajah diunggulkan sebagai salah satu contoh "klasik" dan sebagai karya "perintis" itu pada intinya berkisah tentang aspirasi "moderen" yang datang dari Barat melawan aspirasi dan tata sosial pribumi yang "tradisional". Tokoh pahlawan dalam roman tersebut, Samsulbakhri, adalah seorang pribumi siswa sekolah ala Belanda dan menjadi serdadu pemerintah penjajah. Sedang tokoh penjahatnya, Datuk Maringgih, adalah seorang pribumi, pemberontak kekuasaan pemerintah penjajah, yang perlu di-"tumpas" oleh serdadu seperti Samsulbakhri.<sup>37)</sup>

Apa yang diwariskan para penguasa dan kaum terpelajar produk pemerintah penjajah Hindia Belanda kepada kaum terpelajar

Indonesia selama berpuluh-puluh tahun kemudian, bahkan hingga hari ini, tidak saja suatu versi sejarah kesusasteraan Indonesia moderen, tetapi juga politik kebahasaan yang dikendalikan dan diajarkan dari "atas" untuk rakyat yang dianggap tidak atau belum berbahasa dengan baik atau pun benar. Hingga tahun 1979, Teeuw (1979:14) masih berpendapat bahwa awal timbulnya (sejarah) kesusasteraan Indonesia moderen merupakan berkat didirikannya Balai Poestaka oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda. Dengan pemikiran semacam itu bangsa Indonesia seharusnya berterima kasih kepada penjajah asing untuk jasa mereka di bidang tersebut. Walau sanggahan terhadap versi sejarah awal kesusasteraan Indonesia moderen yang seperti itu telah banyak diajukan berbagai pihak, namun sanggahan-sanggahan itu tampaknya masih belum cukup kuat menumbangkan versi yang telah mapan.<sup>38)</sup> Sedang mengenai keputusan pemerintah penjajah bahwa bahasa Melayu Tinggi (yang dianggap berasal dari

37) Kasus retorika politis kisah *Sitti Noerbaja* ini sudah seringkali dipersoalkan beberapa pengamat sastra, misalnya Sapardi Djoko Damono, termasuk dalam Simposium Nasional Sastra Indonesia Moderen 1984 (Sapardi, 1984). Bahkan dua puluh tahun yang lalu, saya mendengar pengkajian serupa oleh seorang guru bahasa dan sastra di SMP kami. Tapi tampaknya pengkajian itu masih belum cukup kuat melawan sisa-sisa warisan pemikiran kaum terpelajar yang pernah bekerja pada pemerintah penjajahan Belanda. Bahkan dalam buku tentang kesusasteraan Indonesia yang saat ini paling lengkap dan bergengsi, *Sitti Noerbaja* masih dianggap "to a large extent a pre-nationalist" (Teeuw, 1979:15).

38) Hingga tahun 1985, misalnya dalam Seminar Sastra yang diadakan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 12-13 September 1985 di Semarang, tidak sedikit orang yang masih menganggap sejarah kesusasteraan Indonesia moderen berawal sekitar tahun 1920an, bukan 1870an. Salah satu sanggahan terawal (terhadap anggapan itu) yang sering diacu orang ialah sanggahan Pramodya Ananta Toer dan Bahri Siregar pada tahun-tahun 1960an. Sanggahan ini bergema lagi semakin kuat sejak tahun 1970an. Misalnya dalam karya-karya tulis Watson (1971,1982), Sykorsky (1980), Salmon (1981), dan Pramodya Ananta Toer (1982) sendiri.

Riau), yakni bahasa kaum terpelajar, sebagai bahasa yang baik dan benar untuk karya sastra maupun non-sastra tampaknya masih belum banyak dipersoalkan secara kritis.<sup>39)</sup>

Seperti disebutkan di atas, keputusan pemerintah penjajahan Hindia Belanda untuk mengkampanyekan suatu bahasa resmi dan baku melibatkan sejumlah permasalahan yang cukup kompleks. Keputusan itu tidak saja menjadi salah satu bibit peng-Krama-an bahasa Indonesia, tetapi juga bibit nasionalisme karena bahasa yang mereka pilih bukan bahasa Belanda atau salah satu bahasa asing lainnya. Tentang pilihan ini sejumlah ahli telah mengemukakan tafsiran yang kurang lebih beragam.<sup>40)</sup> Tetapi salah satu tafsiran

39) Dalam manuskrip novel *Jejak Langkah*, Pramoedya Ananta Toer dengan bagus menggambarkan reaksi tokoh Minke pada siasat pemerintah penjajah tersebut: "Orang-orang seperti aku, yang menggunakan bukan Melayu sekolah atau Melayu Gubernemen, segera dapat menangkap maksud Gubernemen, ialah agar bocah-bocah dapat menganggap [bahasa yang] bukan Melayu Sekolah atau Gubernemen sebagai bahasa rendahan yang tidak patut, tidak sopan. Dengan demikian diharapkan mereka tidak akan membaca koran, buku, atau majalah Melayu Pasar, yang pada umumnya tidak menggubris kebesaran Gubernemen, maka juga bukan diterbitkan oleh Gubernemen. Dengan caranya yang tidak langsung Gubernemen hendak menanamkan ketidakpercayaan pada segala yang serba Melayu pasar". Dalam novel *Jejak Langkah* yang diterbitkan Hasta Mitra (1985), bagian terutip di atas tidak terdapat.

40) Belakangan, Anderson (1982:71) mencuplik pendapat John Hoffman "bahwa pemerintah jajahan Belanda itulah justru pendekar paling gigih dan paling terdepan

di masa lalu yang menarik sekali datang dari karangan Sutan Takdir Alisjahbana (1957:6-11) "Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan" yang ditulisnya untuk *Suara Umum* (Surabaya) pada tanggal 7 Maret 1932. Sambil mensyukuri pertumbuhan bahasa Indonesia, Alisjahbana menyalahkan "kekikiran" penjajah karena tidak mengajarkan bahasa Belanda sebanyak-banyaknya kepada pelajar pribumi di Hindia Belanda. Ia mendukung pendapat Nieuwenhuis agar sebelum habis masa penjajahan Hindia Belanda, bahasa Belanda diajarkan seluas-luasnya di tanah jajahan itu. Menurut Nieuwenhuis jika hal itu dikerjakan pemerintah penjajah, maka bukan saja bangsa Indonesia akan semakin cepat maju memasuki dunia moderen, tetapi kejayaan (bekas) penjajah Hindia Belanda akan diperpanjang usianya. Seperti yang dikerjakan penjajah Spanyol di Filipina atau Amerika Selatan. Dukungan Alisjahbana pada pendapat Nieuwenhuis jadi menarik karena jika seandainya pemerintah penjajah Hindia Belanda memenuhi harapan Nieuwenhuis sulit untuk diramalkan bahwa hal itu akan sama-sama menguntungkan penjajah dan kaum terjajah. Apalagi lebih menguntungkan pihak kaum terjajah. Bukannya mustahil hal itu akan lebih berakibat tersambung-nya kekuatan penjajah daripada

sekalius terhadap apa yang kelak dinamakan *bahasa Indonesia*; di satu pihak karena sama sekali tak ada maksud untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa kehidupan kolonial antar suku, di pihak lain karena Belanda memerlukan wahana komunikasi tunggal untuk kawasannya yang heterogen itu".

pengembangan kemerdekaan bangsa ini untuk bertumbuh secara mandiri.

Apa yang dibayangkan Alisjahbana dan Nieuwenhuis tentang sikap penjajah Spanyol terhadap kehidupan berbahasa di tanah jajahannya menghantar kita pada uraian mengenai sejarah awal pembakuan bahasa di dalam masyarakat Spanyol sendiri. Peristiwa itu sangat menarik dan penting, karena nampaknya itulah salah satu contoh terawal di dunia untuk percobaan pemakaian bahasa demi kepentingan penguasa. Walau peristiwa itu tidak secara langsung membentuk gejala yang terjadi di Indonesia masa ini, tetapi keduanya tak dapat dipisahkan. Apalagi karena adanya sejumlah kemiripan paralel di antara kedua peristiwa di masa dan tempat yang berbeda.

Seluruh uraian berikut mengenai pembakuan bahasa terawal dalam masyarakat Eropah moderen diangkat dari tulisan Illich (1980), kecuali jika ada tambahan-tambahan komentar yang akan dijelaskan sumbernya.<sup>41)</sup> Illich memperkenalkan satu tokoh sejarah yang selama ini kurang kita kenal. Tokoh itu bernama Elio Antonio de Nebrija, yang hidup sejaman dan selingkung-pergaulan keraton Spanyol dengan Christopher Columbus. Jika Columbus memberikan sumbangan pengabdian-nya kepada Ratu Spanyol dengan melebarkan wilayah kekuasaan kerajaan

41) Tulisan Illich (1980) ini merupakan salah satu dari sejumlah bahan acuan terpenting untuk penyusunan karangan ini yang saya dapatkan atas kebaikan Prof. Alton L. Becker.

menjadi apa yang kemudian disebut Spanyol Baru, sumbangan pengabdian Nebrija kepada Ratu bersifat lebih mendasar dan penting. Nebrija menjadi panglima perluasan wilayah kekuasaan Ratu ke daerah yang "baru" yakni kehidupan subsisten rakyat sehari-hari: bahasa! Nebrija menawarkan kemungkinan bagi Ratu untuk menjajah bahasa rakyatnya sendiri dengan cara memaksakan bahasa-ibu sang Ratu.

Buku tata bahasa pertama dalam sejarah bahasa-bahasa Eropah moderen, menurut Illich, adalah buku tata bahasa Spanyol yang dihasilkan Nebrija. Sementara ia menyelesaikan buku tata bahasanya, Nebrija juga menyiapkan sebuah kamus yang, menurut Illich, hingga masa ini merupakan buku acuan terbaik mengenai bahasa Spanyol Kuna. Dengan kaidah tata bahasa dan kaidah bentuk serta makna kata Nebrija menyediakan kendali bagi penguasa kerajaan untuk menguasai ke-Bhinneka-an dalam kehidupan rakyat di kerajaannya. Menurut Nebrija, seperti yang dilaporkan Illich, bahasa selalu merupakan jodoh kekuatan kerajaan: mereka terbentuk bersama, bertumbuh dan berkembang bersama, serta runtuh bersama-sama pula.

Nebrija meyakinkan Ratunya bahwa bahasa hidup rakyat yang tidak dikendalikan dan diatur akan menjadi suatu ancaman bagi kerajaan. Karena itu Nebrija mengusulkan perlunya menindas bahasa-bahasa rakyat yang tumbuh tanpa kendali itu. Argumentasi Nebrija diajukan dengan latar belakang pengalaman masyarakat sejaman



yang mulai menikmati bacaan hiburan yang dinilainya "liar" atau "murahan". Apa yang terjadi di akhir abad 15 di Eropah itu dengan awal pertumbuhan percetakan buku, nampaknya dapat dibandingkan dengan latar belakang pembentukan Balai Poestaka di Betawi oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda hampir 5 abad kemudian. Seperti perancang pendirian Balai Poestaka, Nebrija meyakinkan Ratunya akan pentingnya suatu bahasa yang standar.

Hal ini dikomentari oleh Illich (1980:35) dengan pandangan yang sangat menarik :

*Our contemporaries believe that standardized language is a necessary condition to teach people to read, indispensable for the distribution of printed books. 42) The argument in 1492 in the opposite. Nebrija is upset because people who speak in dozens of distinct vernacular tongues have become the victims of a reading epidemic. They waste their leisure, throwing away their time on books that circulate outside of any possible bureaucratic control.*

Apa yang terjadi setelah Nebrija berhasil melaksanakan proyeknya dilukiskan secara baik oleh Illich. Negara merampas bahasa

42) Bandingkan dengan pendapat Yus Badudu (1985): "Kalau kita mengatakan, bahwa tak ada gunanya mengutik-utik terus 'onderdil' bahasa itu" untuk mengembangkan dan membina Bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu "bagaimana Anda akan mengajarkan bahasa di sekolah-sekolah? Di seluruh dunia, di tiap negara, bahasa diajarkan seperti itu di sekolah-sekolah". Agaknya Yus Badudu perlu lebih cermat mengamati sejarah bahasa, sejarah dunia, dan sejarah sekolah. Tentunya kita tak mau hanya memikirkan nasib elit yang mencari nafkah dengan menjual pelajaran bahasa baku di sekolah-sekolah dalam status quo kita masa ini.

rakyat, yakni bahasa yang bertumbuh dan berubah-ubah dari, oleh dan untuk rakyat. Rampasan itu diolah dan diproduksi kembali menjadi bahasa baku yang mati dan dijual serta sedikit atau banyak wajib dibeli rakyat. Keberhasilan Nebrija membuat rakyat jadi pihak yang tergantung, yang menadah bahasa produksi dari atas tatanan sosial. Seakan-akan rakyat tidak dapat membaca atau menulis sesuatu dalam bahasa mereka sendiri jika tidak diajar berbahasa tertentu yang ditetapkan dari penguasa. Sejak itu, status sosial dan mobilitas seseorang dapat dicapai dengan membeli pelayanan berbahasa yang resmi.

Apa yang terjadi di Spanyol 5 abad yang lalu memang tidak dapat dianggap sama persis dengan apa yang terjadi di Indonesia masa ini. Terlalu gegabah jika kita langsung saja menyamakan politik Nebrija dengan kegiatan para ahli bahasa kita yang seperti dikatakan Yus Badudu (1985), "bekerja tanpa pamrih.... membaktikan dirinya bagi kemajuan bangsa, bagi kemajuan orang banyak". Kita tak usah terlalu mempersoalkan atau meragukan ketulusan sikap patriotik atau nasionalis seseorang seperti Yus Badudu. Perbedaan hubungan di antara Nebrija dan Ratu Spanyol dengan hubungan di antara para ahli bahasa kita dengan para pejabat pemerintahan cukup gamblang dari ketegangan di antara para ahli bahasa dan pejabat pemerintahan di Indonesia masa kini seperti telah diuraikan di atas.

Tapi di luar perbedaan-perbedaan tersebut, ada suatu persamaan yang mendasar di antara peng-

alaman rakyat Spanyol abad 15 dan rakyat Indonesia masa kini. Mereka didudukkan sebagai pihak yang tergantung kehidupan sosialnya, status sosialnya, dan mobilitas sosialnya dari pencapaian pelajaran bahasa baku yang diproduksi dan dijual kaum elit dari atas. 43) Salah satu tampang gejala ini tampak secara menyolok dari kecenderungan sejumlah besar kaum terpelajar dan melek-huruf di Indonesia yang antri berkonsultasi dan mengajukan pertanyaan kepada para "ahli" atau "pakar" yang ber "wenang" mengenai bagaimana seharusnya mereka berbahasa dengan sesama warga negara. Mereka merasa tidak berdaya dalam berbahasa tanpa bantuan pihak-pihak yang diresmikan menjadi "ahli" bahasa. Mereka termakan oleh kampanye tentang kemampuan berbahasa mereka sendiri yang oleh pranata sosial resmi dinilai tidak baik dan tidak benar. Bahasa Indonesia yang pernah mereka hidupi dengan akrab telah mereka tampik sendiri. Sebagai gantinya mereka blingsatan mengejar produk-produk baru (kata, makna, tata ejaan, serta tata kalimat) yang dijual dari para "ahli" bahasa. Mereka berbondong-bondong berkonsultasi dulu dengan para pengasuh forum "pembinaan" bahasa untuk men-

43) Apa yang bertahun-tahun diharapkan orang seperti Anton M. Moeliono kelihatannya mulai terpenuhi. *Kompas* (1984) melaporkan bahwa kenaikan pangkat wartawan yang bekerja di harian *Suara Karya* ditentukan antara lain oleh kemampuan berbahasa yang "baik dan benar" itu. Demikian pula di kalangan birokrasi lembaga pemerintahan, menurut laporan yang sama.

dapatkan pengesahan bagaimana seharusnya mereka menyatakan gagasan, kemarahan, kekecewaan, cinta kasih, atau keprihatinan dengan kata-kata kepada sesamanya. Bukanlah lelucon atau sesuatu yang berlebihan jika Hersri (1981: 88) memperingatkan kita bahwa pengajaran bahasa harus dipahami dalam kerangka politik untuk menanamkan patriotisme. Sebab, menurutnya, "tanpa dengan usaha demikian maka bahasa nasional itu akan berupa kerangka teknis yang hidup dalam abstraksi, kemudian akan menjadi bahasa asing di tanah air sendiri dan - bukan pula mustahil - bahkan bisa dianggap sebagai bahasa kolonisator atas tanah air sendiri".

Kalau pun apa yang dikuatirkan Hersri tersebut telah mende-kati kenyataan, mungkin hal itu bukannya disebabkan karena ke-"jahat"-an para ahli bahasa kita yang bermain politik. Mungkin yang terjadi justru sebaliknya; mereka tidak dengan sengaja mempercepat terbentuknya status quo kehidupan sosial-politik-ekonomi dengan kesibukan, ketulusan, dan keahlian mengotak-atik "onderdil" bahasa. Sebab, seperti telah dijelaskan di bagian atas tadi, pemikiran mendasar tentang bahasa yang selama beberapa dekade terakhir dominan di Indonesia justru mengabaikan kajian sosial-politik-ekonomi kebahasaan tersebut. Hal-hal itu dianggap berada di "luar" wilayah studi bahasa.

Terlepas dari kadar kesengajaan tersebut, apa yang terjadi di dalam masyarakat kita kini merupakan sesuatu yang teramat serius dan secara mendesak menuntut

pengkajian secara mendasar dan bersungguh-sungguh tentang hakikat dan fungsi bahasa dalam kehidupan nyata bermasyarakat. Tanpa kajian demikian kita masih akan secara dangkal berakrobatik dengan sejumlah perdebatan tentang masalah-masalah makna, bentuk atau ejaan kata dan susunan kata-kata, serta pengajaran bahasa yang dianggap "baik dan benar".

Walau secara langsung, akrobatik mahal seperti itu telah memusingkan dan membebani kaum elit terpelajar kita, bukannya tidak ada dampak lebih besar (walau tak langsung) yang harus ditanggung rakyat kelas bawah yang tidak terlalu perduli dengan isu bahasa yang "baik dan benar". Gunawan Wiradi (1984) mengungkapkan pendapat yang tidak asing di khalayak umum: "Bahasa yang acak-acakan adalah cermin dari kehidupan yang acak-acakan pula". Bahasa dianggap sebagai alat pengungkap pikiran dan perasaan.<sup>44</sup> Padahal, bahasa yang "baik dan benar" harus dicapai dengan belajar yang tidak murah harganya.<sup>45</sup> Maka, "jangan kaget kalau ada pihak tersekolah yang (diam-diam atau bisik-bisik) menilai kaum tak berduit, tak bersepatu, tak berparfum itu tak punya pikiran serta perasaan yang baik dan benar" (Ariel, 1985)•

44) Menurut Laksmi Dewanti (1985), bahasa prokem termasuk "bahasa pergaulan kasar, yang dipakai para penjajah".

45) Perbedaan kemampuan berbahasa yang bersumber dari perbedaan kedudukan sosial politik-ekonomi ini, dipahami oleh Miska M. Amien (1985) bersumber dari

#### DAFTAR ACUAN

- Abdussomad  
1983 "Berbahasa Yang Baik Dan Benar: Apa Artinya?", *Suara Karya*, 7 Januari, hal.5.
- Alisjahbana, S. Takdir  
1954 *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia* jilid I, cetakan VII, Jakarta: Pustaka Rakyat.
- 1957 *Dari Perjuangan Dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Rakyat.
- 1959 *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia* jilid II, cetakan XIX, Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Anderson, Benedict R.  
1966 "The Languages of Indonesian Politics", *Indonesia*, No.1 (April), hal.89-116.
- 1972 "The Idea of Power in Javanese Culture", *Culture and Politics in Indonesia*, disunting Claire Holt, Ithaca: Cornell University Press.
- 1982 "Sembah-Sumpah, Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa", *Prisma*, No.11/Th.XI/hal.69-96.
- Anton M. Moeliono  
1977 "Bahasa Indonesia dan Ragam Ragamnya", bagian kedua dari rangkaian tulisan di *Kompas*, 25-26 Oktober.
- 1982 "Bahasa Dan Struktur Sosial", *Analisis Kebudayaan*, No.3/Th. II/hal.8-15.
- 1984 *Santun Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia.
- 1985 *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- "takdir", dan oleh Abdussomad (1983) bersumber dari "naluri manusia" yang bersifat "alamiah". Keberuntungan kaum elit yang mempunyai kedudukan sosial-politik-ekonomi istimewa dalam masyarakat dan memungkinkan mereka berbahasa dengan "baik dan benar" dipahami oleh Daoed Joesoef (1983). Tetapi menurut Daoed Joesoef, hal itu patut dibanggakan oleh kaum elit, sebab, menurutnya pula, keberuntungan yang menciptakan kesenjangan sosial-politik-ekonomi itu hanyalah "hasil sampingan (by-product)" dan "tidak buruk sama sekali".

- Ariel Heryanto  
1984 "Sastra 'dan' Politik", *RIMA*, Vol.18/Summer, University of Sydney, hal.6-43.
- 1985 "Ganasnya Bahasa, Ganasnya Kekuasaan", *Kompas*, 30 April, hal.IV.
- Aristotle  
1958 *The Pocket Aristotle*, disunting Justin D. Kapten, New York: Washington Square Press.
- Badudu, Yus S.  
1980 *Membina Bahasa Indonesia Baru*, Bandung: CV Pustaka Prima.
- 1982 *Pelik-Pelik Bahasa Indonesia*, cetakan XXI, Bandung: Pustaka Prima.
- 1985 "Bahasa Indonesia Bahasa Kita", *Kompas*, 15 Mei, hal.IV.
- Becker, Alton dan I Gusti Ngurah Oka  
1974 "Person in Kawi: Exploration of an elementary semantic dimension", dalam *Oceanic Linguistics*, No.13, hal.229-255.
- Becker, Alton L.  
1979 "Text-Building, Epistemology, and Aesthetics in Javanese Shadow Theatre", *The Imagination of Reality*, editor: Becker dan Yengoyan, Norwood: Ablex, hal. 211-243.
- 1982 "Binding Wild Words: Cohesion in Old Javanese Prose", cetak lepas, Jakarta: Bhratara.
- 1984 "Biography of a Sentence: A Burmese Proverb", *Text, Play, and Story*, editor Edward Bruma, Washington: American Ethnological Society, hal.135-155.
- Budiman, Arief  
1979 "Modernization, Development and Dependence: A Critique on the Present Model of Indonesian Development", dalam *What Is Modern Indonesian Culture?*, penyunting Gloria Davis, Athens: Ohio University.
- 1982 "Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme", *Prisma*, No.1/Th.XI/hal.14-25.
- 1983 "Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia A-Historis", wawancara dalam *Prisma*, No.6/Th.XII/hal.74-89.
- Drewes, G.W.J.  
1929 "The Influence of Western Civilization on the Language of the East Indian Archipelago", *The Effects of Western Influences*, disunting B. Schrieke, Batavia: G. Kolff & Co.
- Errington, Shelly  
1974 "A Disengagement: Notes on the Structure of Narrative in a Classical Malay Text", makalah *Conference on Modern Indonesian Literature*, University of Wisconsin, hal.2-12.
- Fish, Stanley  
1980 *Is There a Text in This Class?*, Cambridge: Harvard University Press.
- Foulcher, Keith  
1978 "Image and Perspective in Recent Indonesian Literature", *RI-MA*, Vol.12/No.2, hal.1-16.
- Gadamer, Hans-Georg  
1976 *Philosophical Hermeneutics*, diterjemahkan dan disunting David E. Linge, Berkeley: University of California Press.
- Goenawan Mohamad  
1985 "Sedikit Tentang Kekuasaan", *Horison*, No.7/Th.XX/hal.221-224.
- Gunawan Wibisono Adidarmodjo  
1983 "Bahasa Indonesia Sebagai Pembentuk Jalan Pikiran", *Suara Karya*, 18 Nopember.
- Gunawan Wiradi  
1984 "Turut Belajar Membahas Bahasa", *Kompas*, 6 Maret, hal.IV.
- Hamel, A.G. Van  
1972 *Sedjarah Ilmu Bahasa*, terjemahan Willie Koen, Ende: Nusa Indah.
- Hersri S.  
1981 "Proses Pembentukan Bahasa Nasional Indonesia", *Prisma*, No.9 (September), hal.81-88.
- Humaini  
1985 "Romo Mangun: Awas Usaha Usaha Menjatuhkan Harga Wanita", *Minggu Ini*, 15 September, hal.VI.
- Humboldt, Wilhelm von  
1969 "Introduction to Concerning the Variety of Human Language and Its Influence on the Intellectual

- Development of Mankind", *On Language*, disunting Peter H. Salus, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Illich, Ivan  
1980 "Vernacular Value". *CoEvolution Quarterly*, Summer, hal.23-49.
- Joesoef, Daed  
1983 "Bahasa Akademik, Bahasa Asing, Bahasa Indonesia", *Sinar Harapan*, 28 Oktober, hal.6.
- Jos Daniel Parera  
1985 "Kapan Anda Berbahasa Indonesia Dengan Baik dan Benar", *Sinar Harapan*, 9 Juli, hal.VI.
- Jujun S. Suriasumantri  
1983 "Apalah Artinya Sebuah Nama", *Kompas*, 7 Juni, hal.IV.  
1985 "Peningkatan Sarana Berpikir Ilmiah", *Sinar Harapan*, 13 Agustus, hal.VI.
- Keraf  
1984 "Upaya Membentuk Konvensi", *Kompas*, 28 Oktober, hal.VIII.
- Keraf, Gorys  
1984 *Linguistik Bandingan Historis*, Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat  
1974 *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia.
- Kompas  
1984 "Hasil Kampanye Bahasa Belum Terasa 'Meledak'", 18 Oktober, hal.I.  
1985a "Kemampuan Berbahasa Indonesia Rata-Rata Siswa Memprihatinkan", 10 Mei, hal.I.  
1985b "88 Persen Jumlah Penduduk Indonesia Berbahasa Ibu", 4 September, hal.VI.
- Laksmi Dewanti  
1985 "Ketrampilan Berbahasa Peningkah?", *Sinar Harapan*, 14 September, hal.VI, VIII.
- Lukman Ali  
1983 "Masih Soal Kalah Menang", *Tempo*, 21 Mei, hal.75.
- Marbangun Hardjowirogo  
1983 "Pertarungan Bahasa Indonesia Dan Melayu Tempo Doeloe", *Sinar Harapan*, 19 Nopember, hal.6.
- Miska M. Amien  
1985 "Hubungan Pikiran Dengan Bahasa", *Sinar Harapan*, 18 Juli, hal.VI.
- Moedjanto, G.  
1985 "Konsolidasi Kedudukan Dinasti Mataram Lewat Pengembangan Bahasa Jawa", *Basis*, No.7-8/Th. XXXIV.
- Osman, Mohd.Taib dan Abu Hassan Sham (eds)  
1983 *Warisan Prosa Klasik*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Pramoedya A. Toer  
1982 *Tempo Doeloe*, Jakarta: Hasta Mitra.
- Quinn, George  
1983 "The Case of the Invisible Literature: Power, Scholarship, and Contemporary Javanese Writing" *Indonesia*, No.35 (April), hal.1-36.
- Ramos, Terestita V dan Videia De Guzman  
1971 *Tagalog For Beginners*, Honolulu: University of Hawaii Press.
- Reid, Anthony dan David Marr (eds)  
1979 *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, Singapore: Asian Studies Association of Australia.
- Salmon, Claudine  
1981 *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia*, Paris: Association
- Salus, Peter H. (ed)  
1969 *On Language: Plato to von Humboldt*, New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Sapardi Djoko Damono  
1984 "Sosiologi Sastra Indonesia Modern", makalah untuk Simposium Nasional Sastra Indonesia Modern, 26-27 Oktober, di Yogyakarta.
- Scherer, Savitri  
1981 "Yudhistira Ardi Nugraha: Social Attitudes in the Works of a Popular Writer", *Indonesia*, No.31/April/hal.31-52.
- Simatupang, Maurits D.S.  
1983 "Aspek Sosial Budaya Dalam Berbahasa", *Suara Karya*, 28 Oktober.
- Slamet Iman Santoso  
1983 "Bahasa Indonesia Dalam Proses Pengebirian", *Sinar Harapan*, 6 Desember, hal.6.
- Suharno, I.  
1983a "Mencari Acuan Bahasa Indonesia Baku", *Kompas*, 26 Nopember, hal.IV.
- 1983b "Masalah Penirbaratan Ilmu Sosial dan Humaniora", *Kompas*, 13 Desember, hal.IV.
- Sykorsky, W.V.  
1980 "Some Additional Remarks on the Antecedents of a Modern Indonesian Literature", *Bijdragen* 136, IV, hal.498-516.
- Teeuw, A.  
1979 *Modern Indonesian Literature*, Vol.I., The Hague: Martinus Nijhoff.
- Watson, C.W.  
1971 "Some Preliminary Remarks on the Antecedents of Modern Indonesian Literature", *Bijdragen*, 127, IV, hal.417-433.  
1982 "A New Introduction to Modern Indonesian Literature", *Indonesia Circle*, 29 (November), hal.33-40.
- Wilkinson, Richard James  
1901 *A Malay-English Dictionary*, Singapore: Kelly & Walsh Ltd.
- Williams, Raymond  
1977 *Marxism and Literature*, Oxford: Oxford University Press.
- Winarno Surakhmad  
1985 "Demitologisasi Sektor Pendidikan", *Kompas*, 3 April, hal.IV.
- Winstedt, R.O.  
1939 *An English-Malay Dictionary* (third edition), Singapore: Kelly & Walsh Ltd.
- Wittgenstein, Ludwig  
1980 *Culture and Value*, terjemahan Peter Winch, suntingan G.H. von Wright, Chicago: The University of Chicago Press.
- Wojiwasito, S.  
1965 *Linguistik*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wolff, John U. dan Soepomo Poedjosoedar-mo  
1982 *Communicative Codes in Central Java*, Linguistic Series VII, Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University.
- Zoetmulder, P.J.  
1974 *Kalangan*, the Hague: Martinus Nijhoff.  
1982 *Old Javanese-English Dictionary* (Part I), 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.